



21/44284<sup>44284</sup>

## TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI PENERAPAN PERMEN  
KP 56/2016 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK EKONOMI  
DAN SOSIAL NELAYAN EKS PENANGKAP BENIH LOBSTER DI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Manajemen Perikanan**

**Disusun Oleh :**

**RONI YUHAERI**

**NIM. 500951021**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

### EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI PENERAPAN PERMEN KP 56/2016 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL NELAYAN EKS PENANGKAP BENIH LOBSTER DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT

Roni Yuhaeri  
roniyuhaeri@gmail.com

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Penerapan Permen KP 56/2016 tentang pelarangan penangkapan benih lobster telah menimbulkan dampak terhadap nelayan yang telah menggantungkan penghidupannya dari hasil menangkap benih lobster yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu pemerintah melakukan penanggulangan dampak yang lebih luas dengan program kompensasi berupa bantuan sarana budidaya perikanan bagi nelayan eks penangkap benih lobster. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan kajian tingkat keberhasilan pelaksanaan pemberian kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 serta dampaknya terhadap aspek ekonomi dan sosial nelayan eks penangkap benih lobster di Kabupaten Lombok Timur NTB. Tingkat keberhasilan program kompensasi diukur dengan indikator berkurangnya aktivitas penangkapan benih lobster dan keberhasilan budidaya program bantuan kompensasi. Dampak aspek ekonomi sosial nelayan diukur dengan meningkatnya pendapatan nelayan dan kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk keluarganya, serta kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan observasi di lapangan dan kuisioner dari 100 orang nelayan eks penangkap benih lobster. Penentuan jumlah sampel nelayan dilakukan berdasarkan metode alokasi proporsional. Data sekunder diperoleh dari dinas terkait dan para penyuluh lapangan. Untuk mengukur adanya penurunan aktivitas penangkapan benih lobster dan dampak terhadap penghasilan nelayan dilakukan dengan uji T menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan program kompensasi telah terjadi penurunan frekuensi penangkapan benih lobster secara signifikan, namun produktivitas budidaya program kompensasi belum berhasil secara maksimal dengan jumlah panen yang rendah. Penghasilan nelayan juga mengalami penurunan sejak dilaksanakannya program kompensasi. Dari aspek sosial, nelayan memiliki kemampuan yang tetap dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta memenuhi kebutuhan sekunder.

kata kunci : Permen KP 56/2016, kompensasi, benih lobster, nelayan eks penangkap benih lobster, dampak ekonomi sosial



## ABSTRACT

## EVALUATION OF IMPLEMENTING COMPENSATION GIVING THE APPLICATION OF PERMEN KP 56/2016, AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF SEED LOBSTER CATCHERS IN EAST LOMBOK REGENCY, NTB

Roni Yuhaeri  
r.yuhaeri@gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

The application of PERMEN KP No. 56/2016 regarding the prohibition of lobster seed capture has had an impact on fishermen who have relied on their livelihoods as a result of capturing high economic value lobster seeds. Therefore, the government has implemented a wider impact with a compensation program in the form of assistance for fisheries cultivation for fishermen who are former lobster catchers. This research was conducted with the aim of conducting a study of the success rate of implementing compensation giving the application of Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 56 of 2016 as well as its impact on the economic and social aspects of seed lobster catchers in East Lombok Regency, NTB. The success rate of the compensation program is measured by indicators of reduced lobster fishing activities and the successful cultivation of compensation assistance programs. The impact of the social economic aspects of fishermen is measured by the increase in fishermen's income and the ability of fishermen to meet their daily needs, access education and health services for their families, and the ability to meet secondary needs. Retrieval of primary data was carried out by observation in the field and questionnaires. Secondary data was obtained from the relevant agencies and field extension workers. To measure the decrease in lobster fishing activities and the impact on fishermen's income carried out by the T test using the SPSS program. The results showed that after the compensation program had been implemented there had been a significant decrease in the frequency of lobster seed capture, but the compensation productivity of the compensation program had not succeeded optimally. The income of fishermen has also decreased since the implementation of the compensation program. From the social aspect, fishermen are still able to fulfill their daily needs. The ability to access education and health facilities and fulfill secondary needs has not changed.

Keywords : Permen KP 56/2016, compensation, former lobster catchers , economic and social aspect

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU KELAUTAN  
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN (MMP)**

**PERNYATAAN**

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul

**EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI PENERAPAN PERMEN KP  
56/2016 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK EKONOMI DAN  
SOSIAL NELAYAN EKS PENANGKAP BENIH LOBSTER DI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NUSA TENGGARA BARAT**

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik. .

Mataram, Juni 2019  
Yang Menyatakan



**Roni Yuhaeri**  
NIM. 5000951021



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KELAUTAN  
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN (MMP)**

**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Evaluasi Program Kompensasi Penerapan Permen KP 56/2016 serta Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomi dan Sosial Nelayan Eks Penangkap Benih Lobster di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

Penyusun TAPM : Roni Yuhaeri  
NIM : 5000951021  
Program Studi : Magister Manajemen Perikanan  
Hari/Tanggal : Selasa / 14 Mei 2108

**Menyetujui :**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ir. Muhammad Junaidi, M.Si  
NIP. 19640815 198903 1 002

Adhi Susilo, S.Pt., M.Biotech.,St., Ph.D.  
NIP. 19700416 199903 1 001

**Penguji Ahli**

Prof. Dr. Ir. Etty Riani, MS  
NIP. 19620812 198603 2 001

**Mengetahui,**

Ketua Pascasarjana STEM,

Dekan FMIPA-UT,

Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si  
NIP. 19631111 198803 2 002

Dr. Agus Santoso, M.Si.  
NIP. 19640217 199303 1 001



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU KELAUTAN  
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN (MMP)**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Roni Yuhaeri  
 NIM : 5000951021  
 Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan  
 Judul TAPM : Evaluasi Program Kompensasi Penerapan Permen KP 56/2016  
 serta Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomi Dan Soisal  
 Nelayan Eks Penangkap Benih Lobster di Kabupaten Lombok  
 Timur Nusa Tenggara Barat.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister  
 (TAPM) Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan Program  
 Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/ tanggal : Selasa, 14 Mei 2019  
 Waktu : 13.00 – 14.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS\***

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji  
**Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si**

Tanda tangan

Penguji Ahli  
**Prof. Dr. Ir. ETTY RIANI, MS**

Pembimbing I  
**Dr. Ir. Muhammad Junaidi, M.Si**

Pembimbing II  
**Adhi Susilo, S.Pt., M.Biotech., St., Ph.D.**



## Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) pada Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemn Perikanan dengan judul "Evaluasi Program Kompensasi Penerapan Permen KP 56/2016 serta Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomi Dan Soisal Nelayan Eks Penangkap Benih Lobster di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat."

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pembimbing I Bapak **Dr. Ir. Muhammad Junaidi, M.Si** dan Pembimbing II Bapak **Adhi Susilo, S.Pt., M.Biotech.,St., Ph.D.** atas arahan dan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan TAPM.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Penyuluh Perikanan Kabupaten Lombok Timur dan Balai Karantina Ikan dan Pengendali Mutu (BKIPM) Kelas II Mataram yang telah membantu di lapangan maupun memberikan informasi terkait judul di atas serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan TAPM ini masih banyak kekurangan karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk perbaikan di dalam penulisan selanjutnya. Dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Mataram, 2019

Penulis

## Daftar Riwayat Hidup

- Nama : Roni Yuhaeri
- NIM : 5000951021
- Program Studi : Ilmu Kelautan Bidang minat Manajemen Perikanan
- Tempat/Tanggal Lahir : Tegal/ 31 Desember 1973
- Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Angkasa IV Bandung pada tahun 1986
- Lulus SMP di SMPN 7 Tegal pada tahun 1989
- Lulus SMA di SMAN 1 Tegal pada tahun 1992
- Lulus D IV di STP Jakarta pada tahun 1996
- Riwayat Pekerjaan : - Tahun 1996-2002, sebagai PNS Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Lombok - Ditjen Perikanan Departemen Pertanian RI.
- Tahun 2003-2013, sebagai Kepala Seksi di Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) Tanjung Luar, UPTD Dinas Perikanan Provinsi NTB
- Tahun 2013-2016, sebagai Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
- Tahun 2016-2019, sebagai Kepala Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya, UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
- Tahun 2019-sekarang, sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Mataram,

2019

**Roni Yuhaeri**  
NIM. 5000951021

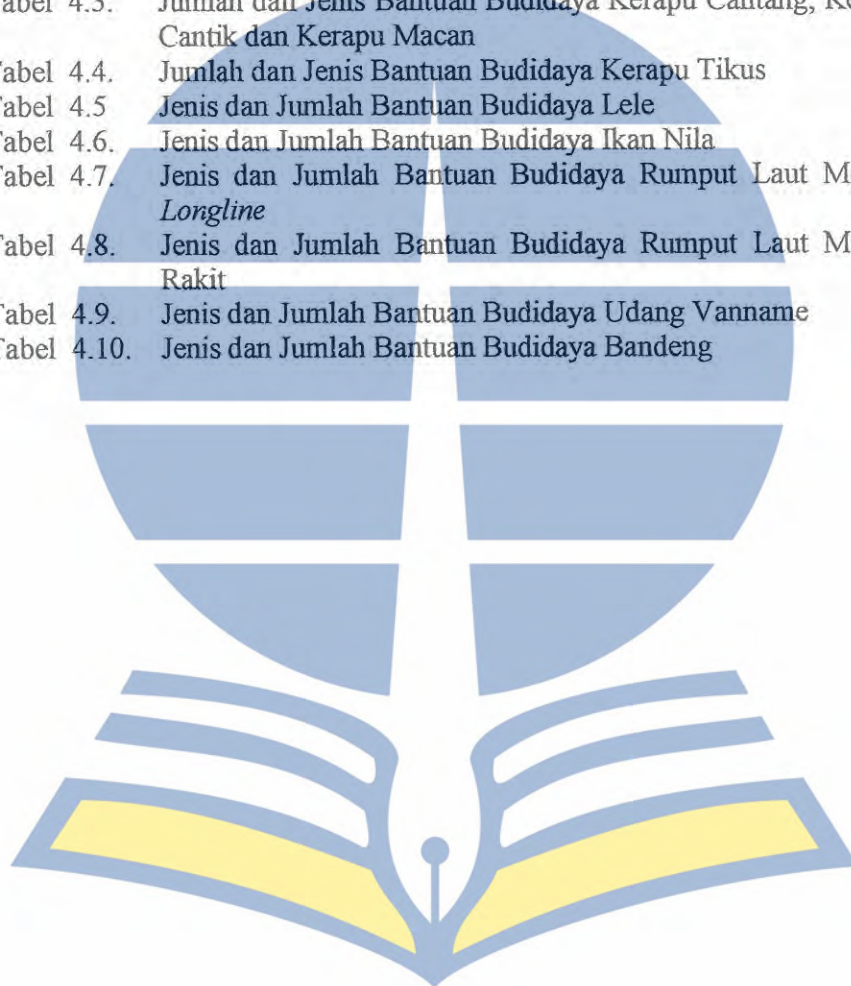


## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Abstrak .....	iii
Pernyataan .....	iv
Lembar Persetujuan .....	v
Lembar Pengesahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Riwayat Hidup .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Lobster sebagai Sumber Daya Kelautan Potensial .....	8
B. Aspek Ekonomi Sosial Nelayan .....	20
C. Pelarangan Penangkapan Benih Lobster .....	24
D. Bantuan Prasarana Budidaya sebagai Kompensasi .....	26
E. Evaluasi Kebijakan .....	28
F. Penelitian Terdahulu .....	33
G. Kerangka Berpikir .....	37
<b>BAB III. METODOLOGI</b> .....	<b>38</b>
A. Rancangan Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Metode Pengumpulan Data .....	39
D. Pengolahan Data dan Analisis .....	44
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	64
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>92</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Kuisioner	
Lampiran 2. Frekuensi Menangkap Benih Lobster per Bulan	
Lampiran 3. Hasil Produksi Budidaya	
Lampiran 4. Mata Pencaharian Utama dan Penghasilan Utama Nelayan	
Lampiran 5. Mata Pencaharian Sampingan dan Penghasilan Sampingan Nelayan	
Lampiran 6. Hasil Uji t tes	
Lampiran 7. Salinan Permen KP No.56 Tahun 2016	

## TABEL TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Resume Penelitian-penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1. Variabel Penelitian, Indikator, dan Data yang Dibutuhkan	42
Tabel 3.2. Jumlah Sampel Berdasarkan Jenis Budidaya	44
Tabel 4.1. Daftar Jumlah Paket Budidaya dan Nilai Bantuan per Jenis Budidaya	52
Tabel 4.2. Jumlah dan Jenis Bantuan untuk Budidaya Bawal Bintang	54
Tabel 4.3. Jumlah dan Jenis Bantuan Budidaya Kerapu Cantang, Kerapu Cantik dan Kerapu Macan	55
Tabel 4.4. Jumlah dan Jenis Bantuan Budidaya Kerapu Tikus	57
Tabel 4.5. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Lele	58
Tabel 4.6. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Ikan Nila	59
Tabel 4.7. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Rumput Laut Metode <i>Longline</i>	60
Tabel 4.8. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Rumput Laut Metode Rakit	61
Tabel 4.9. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Udang Vannamee	62
Tabel 4.10. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Bandeng	63





## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1.	Lobster Hijau ( <i>Panulirus versicolor</i> )	10
Gambar 2.2.	Udang batu atau udang jaka ( <i>Panulirus penicillatus</i> )	10
Gambar 2.3.	Udang bunga atau raja udang ( <i>Panulirus longipes</i> )	11
Gambar 2.4.	Lobster mutiara ( <i>Panulirus ornatus</i> )	11
Gambar 2.5.	Udang jarak ( <i>Panulirus polyphagus</i> )	12
Gambar 2.6.	Lobster hijau pasir ( <i>Panulirus homarus</i> )	12
Gambar 2.7.	Morfologi Lobster	14
Gambar 2.8.	Siklus Daur Hidup Lobster ( <i>Panulirus sp.</i> )	17
Gambar 2.9.	Cara Pengukuran Panjang Karapas Lobster	26
Gambar 2.10.	Kerangka Berpikir	37
Gambar 3.1.	Peta Lokasi Penelitian Telong-elong dan Teluk Ekas	39
Gambar 4.1.	Grafik Jumlah dan Jenis Budidaya Bantuan Kompensasi	53
Gambar 4.2.	Grafik Tingkat Pendidikan Responden	58
Gambar 4.3.	Aktivitas Penangkapan Benih Lobster	67
Gambar 4.4.	Grafik Penyelundupan Lobster 2016-2018 61	70
Gambar 4.5.	Grafik kondisi kemampuan dalam aspek sosial	88



## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak pada posisi antara  $08^{\circ}10'$  -  $09^{\circ}05'$  LS dan  $115^{\circ}40'$  -  $119^{\circ}05'$  BT, merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta dikelilingi oleh 278 pulau-pulau kecil. Luas wilayah mencapai  $49.312,19 \text{ km}^2$  yang terdiri dari luas perairan sebesar  $29.159,04 \text{ km}^2$  atau 59 % dari luas wilayah dan luas daratan sebesar  $20.153,15 \text{ km}^2$  atau 41% dari luas wilayah dengan panjang garis pantai mencapai 2.333 Km. Besarnya luas perairan yang mengelilingi Pulau Lombok sebesar  $8.046 \text{ km}^2$  dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia di Selatan dan Laut Jawa di sebelah Utara memungkinkan pulau ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar, salah satunya adalah lobster dan benihnya yang tersebar di seluruh wilayah pesisir bagian selatan.

Sebagai salah satu potensi sumber daya ikan yang sangat penting dan memiliki nilai ekonomis tinggi serta ketersediaan benih dengan jumlah yang besar maka usaha budidaya lobster mempunyai potensi untuk dikembangkan. Menurut Junaidi, dkk (2010) bahwa Lobster (*Panulirus sp.*) atau udang karang merupakan salah satu komoditas ekspor dan komponen penting bagi perikanan udang dari subsektor perikanan Indonesia. Komoditas ini perlu lebih dikembangkan karena nilai perdagangan dan potensinya cukup tinggi. Menurut catatan Statistik Indonesia pada tahun 2005, lobster menempati



urutan ke empat untuk komoditas ekspor dari bangsa *Crustacea* setelah marga *Penaeus*, *Metapeaneus*, dan *Macrobrachium*

Permintaan akan lobster selalu meningkat tajam setiap tahunnya. Tingginya harga lobster menjadi daya tarik tersendiri bagi nelayan untuk menangkap lobster, termasuk di perairan selatan Pulau Lombok. Berdasarkan data BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) Kelas II Mataram, dalam rentang tahun 2014 total benih lobster yang keluar dari NTB tercatat 5,6 juta ekor dengan nilai mencapai Rp 130 M (Amrin, 2017). Perairan Teluk Ekas terletak di bagian Selatan Pulau Lombok memiliki kondisi perairan relatif tenang dengan hamparan terumbu karang yang sangat luas merupakan salah satu habitat lobster. Penangkapan lobster di kawasan ini cukup intensif, selain dilakukan penangkapan yang berukuran konsumsi, juga terhadap lobster ukuran benih untuk usaha budidaya pembesaran dalam keramba jaring apung (Junaidi,dkk, 2010).

Indonesia merupakan negara pengekspor utama benih lobster, terutama ke negara-negara tujuan ekspor seperti Vietnam, Hongkong, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia (BKIPM, 2015). Jenis lobster yang umumnya diekspor adalah *Panulirus homarus* (lobster pasir) dan *P. ornatus* (lobster mutiara). Tingginya kuantitas dan frekuensi permintaan benih lobster dari luar Indonesia menyebabkan harga benih meningkat drastis. Pada sekitar tahun 2012, harga benih ukuran 2-3 cm berkisar antara Rp. 2.000 sampai Rp. 2.500,- per ekor. Pada tahun 2013 permintaan benih untuk ekspor meningkat yang mengakibatkan harga benih juga semakin mahal, yaitu

sekitar Rp 13.000,- per ekor pada Juli 2013 dan pada bulan Desember 2014 mencapai Rp 17.000 sampai 20.000,- per ekor (Erlania, 2016).

Tingginya permintaan benih dan harga benih yang mahal, menyebabkan masyarakat cenderung memilih untuk langsung menjual benih hasil tangkapan dari pada melakukan aktivitas budidaya pembesaran. Sementara itu harga lobster ukuran konsumsi juga relatif tinggi dibandingkan komoditas laut lainnya pada umumnya. Harga lobster ukuran konsumsi (>500 gram) berkisar antara US\$ 65-80 di Jakarta dan Bali, sedangkan harga jual di tingkat pembudidaya di Vietnam dengan ukuran yang sama lebih tinggi, yaitu berkisar antara US\$ 90-120. Berdasarkan informasi dari masyarakat pada beberapa lokasi penghasil benih lobster di daerah Lombok, pada tahun 2014 terjadi penurunan hasil tangkapan benih lobster di sekitar perairan Lombok. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu naiknya harga benih hingga mencapai Rp 20.000,- per ekor; selain tingginya permintaan benih dari negara importir.

Sebagai upaya untuk konservasi terhadap keberadaan lobster, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang perlu untuk diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus pelagius* spp.) dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus pelagius*



spp.) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbitnya peraturan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan karena dianggap penangkapan benih lobster tersebut secara nyata menurunkan stok sumberdaya lobster di Perairan Indonesia, langkah ini mendapat dukungan dari *World Wide Fund for Nature* (WWF) menurut Damora (2015).

Implementasi Permen KP 56/2016 tersebut banyak terjadi penentangan dari masyarakat nelayan penangkap benih lobster karena menyebabkan kehilangan pendapatan. Menurut Erlania (2010) rata-rata penghasilan penangkap benih lobster per orang per bulan sebesar Rp. 6.240.000 sampai Rp. 9.600.000 dengan kisaran harga jual benih per ekor Rp. 13.000 sampai dengan Rp. 20.000. Terbitnya Permen KP tersebut, mengakibatkan nelayan yang telah menggantungkan mata pencahariannya dari menangkap benih lobster ini terkena langsung dampaknya. Witomo dan Nurlaili (2015) melaporkan hasil penelitiannya bahwa penangkapan bibit lobster sudah menjadi mata pencaharian utama nelayan di Lombok Tengah dan Lombok Timur, kegiatan ini meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh Permen KP 56/2016 bagi nelayan penangkap bibit lobster adalah menurunnya pendapatan nelayan karena tidak dapat lagi menjual hasil tangkapan di bawah 300 gram dan berdampak kehidupan nelayan seperti menjual barang-barang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Erlania dkk (2016) melaporkan bahwa adanya regulasi yang melarang penangkapan benih lobster menyebabkan berbagai dampak sosial ekonomi terhadap kehidupan

masyarakat pesisir Pulau Lombok. Fajari dkk (2016) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan Permen KP 1/2015 telah berlaku dan sudah terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015 di wilayah Indonesia, tetapi masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya, yaitu para nelayan merasa dirugikan karena nelayan merasa penghasilannya berkurang setelah dilarang melakukan penangkapan benih lobster. Permen KP 1/2015 itu kemudian disempurnakan dengan Permen KP 56/2016. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji, mensosialisasi, dan memberi mata pencaharian alternatif yang baik untuk nelayan agar tercipta peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan benar.

Dalam upaya pelaksanaan Permen KP pelarangan penangkapan benih lobster ini pemerintah juga telah memberlakukan penegakan hukum bagi para pelanggarnya. Namun meskipun demikian, upaya penyelundupan benih lobster justru meningkat dalam 3 tahun terakhir mencapai Rp 158 M dengan 13 kali upaya penyelundupan. Hal ini disebabkan besarnya permintaan pasar internasional terhadap benih lobster dengan harga tinggi terutama dari Vietnam (Anonim, 2017).

Dalam rangka menanggulangi dampak pelaksanaan Permen KP 56/2016 terhadap nelayan eks penangkap benih lobster, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya agar penangkap benih lobster meninggalkan pekerjaan lamanya yaitu menangkap benih lobster dengan menyiapkan dana



sebesar Rp. 50 milyar sebagai kompensasi. Kompensasi tersebut berupa bantuan prasarana dan sarana budidaya perikanan untuk alih usaha bagi nelayan eks penangkap benih lobster dari aktivitas menangkap benih lobster kepada kegiatan budidaya perikanan. Di Lombok sejumlah 2.246 Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang bersedia menghentikan penangkapan benih lobster dan disiapkan paket kompensasi tersebut, masing-masing paket senilai Rp 20 juta – Rp 22 juta per RTP untuk berbagai jenis usaha budidaya meliputi budidaya ikan kerapu, bandeng, vaname, lele, bawal bintang dan nila. Jumlah kelompok penerima bantuan di Pulau Lombok sebanyak 201 kelompok yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat sebanyak 22 kelompok terdiri dari 299 rumah tangga perikanan (RTP), Kabupaten Lombok Tengah 83 kelompok terdiri dari 873 RTP, dan Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah kelompok penerima bantuan dana kompensasi terbanyak yaitu sebanyak 96 kelompok terdiri dari 1.074 RTP (DKP NTB, 2017) atau sebanyak 47,76% dari total kelompok penerima di Pulau Lombok. Menurut KKP (2018) proyeksi outcome dari kegiatan ini menghasilkan produksi budidaya sebesar 2.495,3 ton atau senilai Rp. 190 M dan menyerap tenaga kerja sebanyak 9.100 orang.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan usulan penelitian dengan memilih judul penelitian: “Evaluasi Program Kompensasi Penerapan Permen KP 56/2016 serta Dampaknya terhadap Aspek Ekonomi dan Sosial Nelayan Eks Penangkap Benih Lobster Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keberhasilan program kompensasi berupa bantuan prasarana dan sarana budidaya untuk alih usaha penangkap benih lobster di Lombok Timur NTB.
2. Bagaimana dampak pemberian kompensasi terhadap aspek ekonomi dan sosial nelayan eks penangkap benih lobster.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan pemberian kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 di Kabupaten Lombok Timur NTB.
2. Melakukan kajian dampak pemberian bantuan kompensasi terhadap aspek ekonomi dan sosial nelayan eks penangkap benih lobster di Kabupaten Lombok Timur NTB.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manajemen perikanan.
2. Menjadi salah satu pemecahan masalah pembangunan
3. Sebagai informasi bagi dinas terkait dalam pengambilan kebijakan.



## BAB II. LANDASAN TEORI

### A. Lobster sebagai Sumber Daya Kelautan Potensial

*Crustacea* merupakan hewan air yang terdapat di air laut maupun air tawar yang berasal dari bahasa latin *Crusta* artinya cangkang sehingga *Crustacea* bisa diartikan hewan yang bercangkang. *Crustacea* merupakan salah satu kelompok besar dari *Arthropoda* yaitu kelompok hewan yang memiliki kaki yang tersusun atas ruas-ruas. Termasuk di dalamnya kelompok *Crustacea* adalah udang-udangan, kepiting dan rajungan.

Produksi perikanan yang termasuk kelompok *Crustacea* di Indonesia diperkirakan mencapai 23% dari produksi perikanan total dunia. Produksi *Crustacea* sebesar ini senilai kurang lebih 2.5 sampai 6 Milyar USD, dan menduduki ranking pertama dalam perdagangan perikanan dunia (BPS, 2014). Berdasarkan data BPS tersebut, perikanan *Crustacea* Indonesia diperkirakan telah mencapai nilai kurang lebih 800 juta USD. Jepang, Hongkong, USA, Taiwan dan beberapa Negara Eropa merupakan tujuan ekspor berbagai jenis *Crustacea* tersebut.

#### 1. Klasifikasi Ilmiah Lobster

Dalam bahasa Inggris, lobster dikenal dengan nama *Crifish* atau *Spiny Lobster*, sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan nama udang karang atau udang barong.

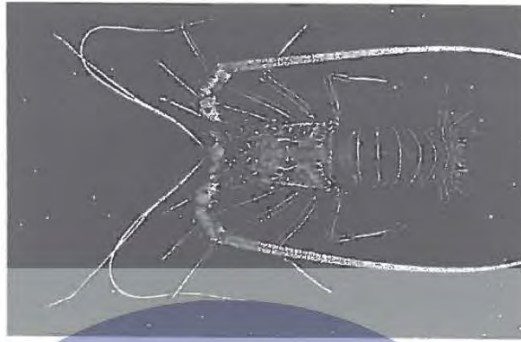
Klasifikasi ilmiah dari lobster (*Panulirus spp.*) adalah sebagai berikut (Spence, 1989) :

Kingdom : Animalia  
Filum : Arthropoda  
Subfilum : Invertebrata  
Class : Crustacea  
Sub class : Malacostraca  
Ordo : Decapoda  
Famili : *Palinuridae*  
Genus : *Panulirus*  
Spesies : *Panulirus sp.*

Udang karang di Indonesia menurut jenisnya ada enam, yaitu lobster hijau atau lobster bambu (*Panulirus versicolor*), udang batu atau udang jaka (*Panulirus penicillatus*), udang bunga atau raja udang (*Panulirus longipes*), lobster mutiara (*Panulirus ornatus*), udang jarak (*Panulirus polyphagus*), dan lobster hijau pasir (*Panulirus homarus*) (Rianta, 2013). Jenis-jenis lobster tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Lobster hijau atau *Painted Spiny Lobster (Panulirus versicolor)*, pada bagian punggungnya berwarna hijau bening dengan semburat merah kecokelatan.





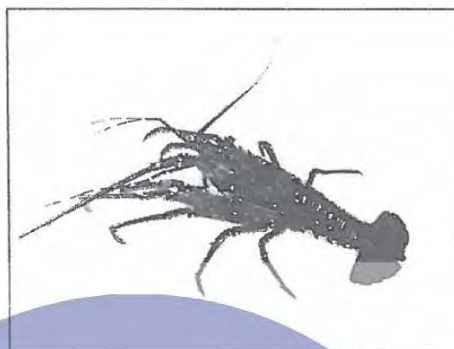
Gambar 2.1. Lobster Hijau (*Panulirus versicolor*)

- b. Udang batu atau udang jaka atau *Pronghorn Spiny Lobster* (*Panulirus penicillatus*). Bagian badan berwarna hijau tua dan hijau kehitaman dengan warna coklat yang melintang di setiap ruas badannya. Lobster jenis ini banyak ditemukan tidak jauh dari pantai.



Gambar 2.2. Udang batu atau udang jaka (*Panulirus penicillatus*)

- c. Udang bunga atau raja udang atau *Long Legged Spiny Lobster* (*Panulirus longipes*). Bagian tubuh lobster ini memiliki warna dasar kecokelatan dengan kebiruan pada antenanya.



Gambar 2.3. Udang bunga atau raja udang (*Panulirus longipes*)

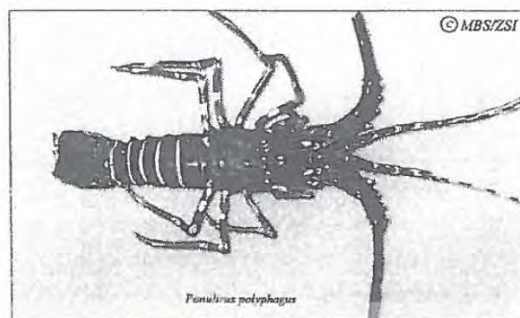
- d. Lobster mutiara atau *Ornate Spiny Lobster* (*Panulirus ornatus*).  
Badannya berwarna hijau kebiruan berbelang – belang dengan warna hitam dan kuning pada kaki-kakinya.



Gambar 2.4. Lobster mutiara (*Panulirus ornatus*)

- e. Udang jarak atau *Mud Spiny Lobster* (*Panulirus polyphagus*),  
tubuhnya memiliki warna dasar coklat dengan warna putih melintang  
di setiap ruas badannya.





Gambar 2.5. Udang jarak (*Panulirus polyphagus*)

- f. Lobster hijau pasir atau *Scalloped Spiny Lobster* (*Panulirus homarus*). Bagian punggung pada tubuhnya didominasi oleh warna kehijauan atau coklat kemerahan dan terdapat bintik-bintik besar dan kecil berwarna kuning terang.



Gambar 2.6. Lobster hijau pasir (*Panulirus homarus*)

## 2. Habitat Lobster

Habitat alami lobster adalah kawasan terumbu karang di perairan pantai dari yang dangkal sampai 100 meter di bawah permukaan laut. Kawasan terumbu karang yang merupakan perairan tempat hidup lobster di Indonesia seluas kurang lebih 67.000 km<sup>2</sup>. Habitat lobster tersebar di

perairan daerah Sumatera Barat, timur Sumatera, selatan dan utara Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Selat Malaka, timur Kalimantan, barat Kalimantan, selatan Kalimantan, utara dan selatan Sulawesi, serta Maluku dan Papua, terutama Laut Arafuru.

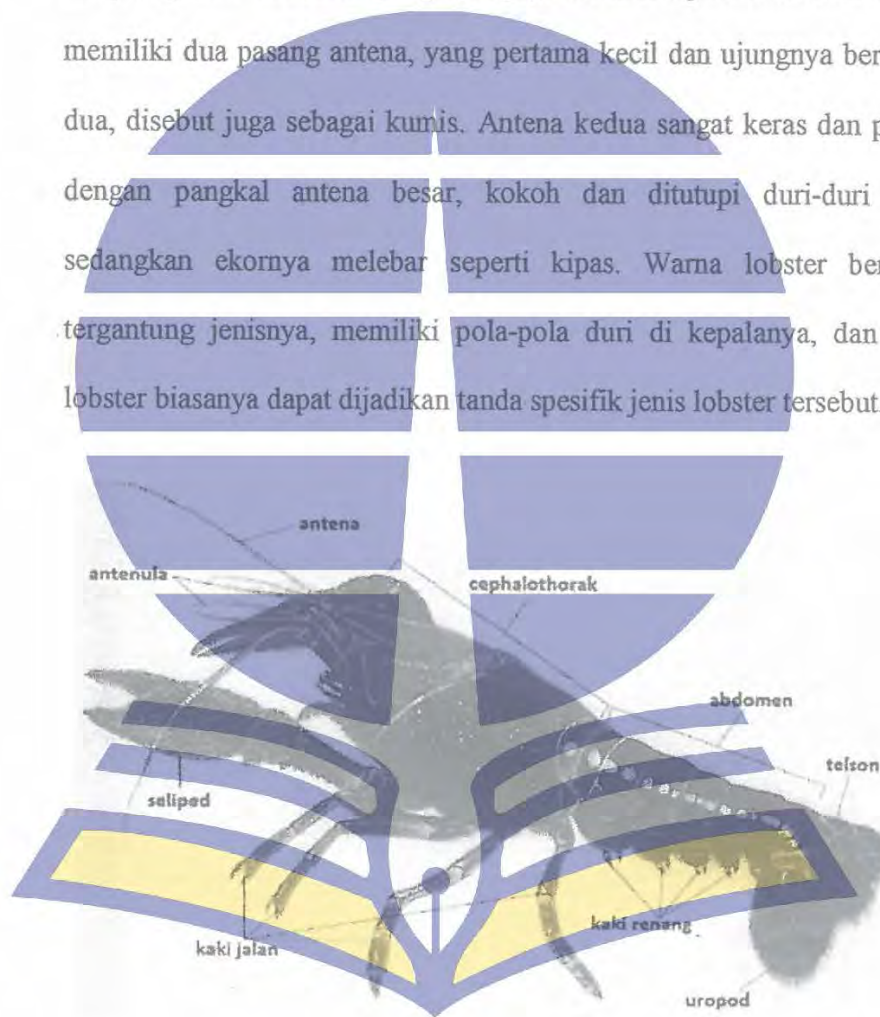
Lobster biasanya terdapat pada lingkungan perairan karang mulai dari permukaan hingga kedalaman 100 meter atau kurang dari 200 meter, terutama pada perairan hangat dengan kisaran suhu 20-30°C dengan posisi lintang diantara 30° LS- 30°LU. Keragaman jenis lobster lebih besar di daerah perairan tropis dan sub tropis, tetapi memiliki kepadatan relatif lebih rendah. Keragaman jenis akan berkurang bila berada di daerah perairan hangat, tetapi memiliki kepadatan yang tinggi.

### 3. Morfologi dan Anatomi Lobster

Menurut Spence (1989), lobster terdiri dari kepala dan thorax yang tertutup oleh karapas dan memiliki abdomen yang terdiri dari enam segmen. Karakteristik yang paling mudah untuk mengenali lobster adalah adanya capit (*chelae*) besar yang pinggirnya bergerigi tajam untuk menyobek dan juga menghancurkan makanannya. Udang karang mudah dikenal karena bentuknya yang besar dibanding dengan udang niaga lainnya. Isnansetyo dan Yuspanani (1993) memberikan gambaran yang jelas mengenai morfologi udang karang, yaitu mempunyai bentuk badan memanjang, silindris, kepala besar ditutupi oleh karapas berbentuk silindris, keras, tebal dan bergerigi. Mempunyai antena besar dan panjang menyerupai cambuk, dengan rostum yang kecil. Pada udang barong betina



*endopod* pada *pleopod* II tanpa *appendix internalstylamblys*. Muljanah dkk (1994) menyatakan bahwa, lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang ruas abdomen yang ujungnya berduri tajam dan kuat. Lobster memiliki dua pasang antena, yang pertama kecil dan ujungnya bercabang dua, disebut juga sebagai kunis. Antena kedua sangat keras dan panjang dengan pangkal antena besar, kokoh dan ditutupi duri-duri tajam, sedangkan ekornya melebar seperti kipas. Warna lobster bervariasi tergantung jenisnya, memiliki pola-pola duri di kepalanya, dan warna lobster biasanya dapat dijadikan tanda spesifik jenis lobster tersebut.



Gambar 2.7. Morfologi Lobster

Alat pencernaan sempurna, pada mulut terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunyah dan mengisap. Anus terdapat di bagian ujung (*posterior*) tubuh. Sistem peredaran darah terbuka, memiliki

jantung pembuluh terletak di daerah dorsal (punggung). Lobster bernafas dengan insang dan memiliki sistem saraf berupa tangga tali kemudian ganglion otaknya berhubungan dengan alat indera. Lobster memiliki alat indera berupa antena yang berfungsi sebagai alat peraba, dan mata tunggal (*ocellus*) dan mata majemuk (*facet*). Alat indera lainnya adalah berupa organ pendengaran khususnya pada *insecta*, *statocyst* (alat keseimbangan). Alat ekskresi yang dimiliki berupa *coxal* atau kelenjar hijau, saluran Malpighi dan alat reproduksi, biasanya terpisah (*dioceus*).

#### 4. Sistem Reproduksi Lobster

Biasanya lobster keluar dari tempat tinggalnya ke perairan yang dalam untuk bertelur atau kawin. Reproduksi lobster secara eksternal, dimulai setelah lobster betina melakukan *moulting*. Menurut Subani (1984) proses yang terjadi saat reproduksi yaitu lobster jantan meletakkan cairan kental dari liang kelamin (liang sperma) pada lubang pengeluaran lobster betina. Kemudian cairan tersebut mengeras membentuk semacam kantong sperma. Setelah kejadian tersebut lobster betina mulai mengeluarkan butir-butir telur yang berwujud cairan kental kemudian melekat pada kaki-kaki renangnya. Selanjutnya, lobster betina merobek kantong sperma dengan ujung kaki jalan kelima yang berupa capit semu (*Pseudo claw*), dan dengan demikian terjadilah pembuahan.

#### 5. Siklus Daur Hidup Lobster

Menurut Subani (1984) lobster dapat digolongkan sebagai binatang yang memiliki sifat mengasuh dan memelihara keturunannya walaupun



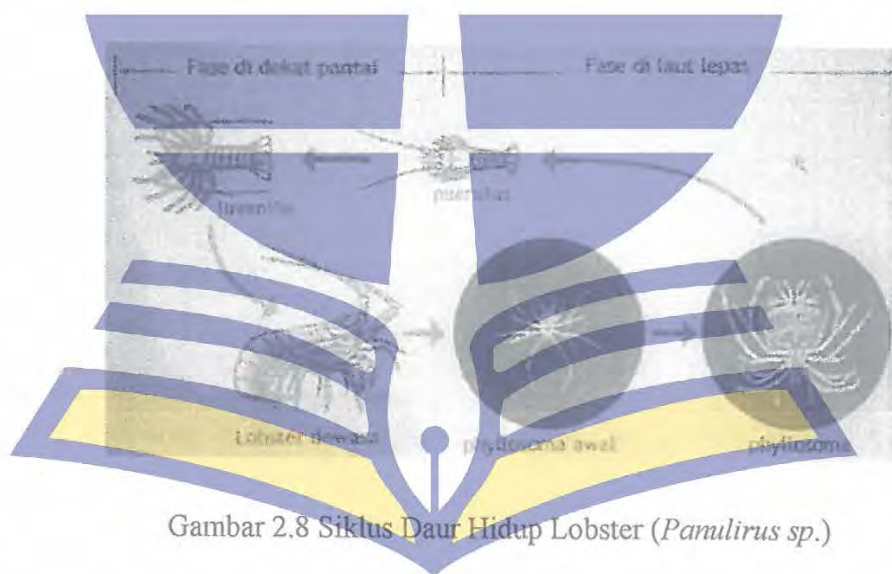
sifatnya hanya sementara. Lobster betina yang sedang bertelur melindungi telurnya dengan cara meletakkan atau menempelkan butir-butir telurnya di bagian bawah badan (*abdomen*) sampai telur tersebut dibuahi dan menetas menjadi larva udang. Menjelang akhir periode pengeluaran telur dan setelah dibuahi, lobster akan bergerak menjauhi pantai dan menuju ke perairan karang yang lebih dalam untuk penetasan.

Nontji (1993) menyatakan bahwa, jumlah telur yang dihasilkan setiap ekor betina lobster dapat mencapai lebih dari 400.000 butir. Telur-telur tersebut akan menetas dan berubah menjadi larva pelagis. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, udang karang (*lobster*) mempunyai daur hidup yang kompleks. Telur yang telah dibuahi menetas menjadi larva dengan beberapa tingkatan (*stadium*). Larva lobster memiliki bentuk yang sangat berbeda dari yang dewasa. Larva pada stadium *filosoma* misalnya, mempunyai bentuk yang pipih seperti daun sehingga mudah terbawa arus.

Semenjak telur menetas menjadi larva hingga mencapai tingkat dewasa dan akhirnya mati, maka selama pertumbuhannya, lobster selalu mengalami pergantian kulit (*moultng*). Pergantian kulit pada lobster lebih sering terjadi pada stadia larva (Subani, 1984). Secara umum dikenal adanya tiga tahapan stadia larva, yaitu "*naupliosoma*", "*filosoma*", dan "*puerulus*". Perubahan dari stadia pertama ke stadia berikutnya selalu terjadi pergantian kulit yang diikuti perubahan-perubahan bentuk (*metamorphose*) yang terlihat dengan adanya modifikasi-modifikasi terutama pada alat geraknya. Pada stadia *filosoma* yaitu bagian pergantian

kulit yang terakhir, terjadi stadia baru yang bentuknya sudah mirip lobster dewasa walaupun kulitnya belum mengeras atau belum mengandung zat kapur.

Pertumbuhan berikutnya setelah mengalami pergantian kulit lagi, terbentuklah lobster muda yang kulitnya sudah mengeras karena diperkuat dengan zat kapur. Bentuk dan sifatnya sudah mirip lobster dewasa (induknya) atau disebut sebagai *juvenile*. Lama hidup sebagai stadia larva untuk lobster berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Lobster yang hidup di perairan tropis, prosesnya lebih cepat dibanding dengan yang hidup di daerah sub-tropis. Waktu yang diperlukan untuk mencapai stadia dewasa untuk lobster tropis antara 3 sampai 7 bulan menurut Subani (1984).



Gambar 2.8 Siklus Daur Hidup Lobster (*Pamulirus sp.*)

## 6. Karakteristik Lobster

Jenis kelamin lobster dapat ditemukan di antara kaki jalannya. Alat kelamin jantan lobster terletak diantara kaki jalan kelima berbentuk lancip dan menonjol keluar. Sedangkan alat kelamin betina lobster terletak diantara kaki jalan ketiga berbentuk dua lancipan. Lobster memiliki



karakteristik yang harus diketahui oleh para pembudidaya untuk mendukung keberhasilan dalam usahanya.

a. *Nocturnal*

Lobster merupakan organisme *nocturnal* yaitu organisme yang melakukan aktivitasnya pada malam hari. Lobster akan beraktivitas pada malam hari terutama untuk makan. Pada saat siang hari, lobster akan istirahat di bebatuan karang.

b. *Moulting*

Lobster dapat berganti kulit atau *moulting* seperti jenis organisme berkarapas lainnya. Proses pergantian kulit ini biasanya pada saat fase pertumbuhan dan penambahan berat tubuhnya. Pada saat *moulting*, lobster akan melakukannya di tempat persembunyian tanpa makan dan tidur. Proses *moulting* ini biasanya berlangsung selama 1 sampai 2 minggu.

c. Kanibalisme

Pakan yang disukai lobster yaitu berbagai jenis kepiting, moluska, dan ikan. Pada saat mereka kekurangan pakan, mereka dapat memangsa sesamanya atau bersifat kanibalisme.

d. Daya tahan

Pada umumnya, udang dapat bertahan hidup pada perairan yang memiliki salinitas yang fluktuatif. Namun lobster sangatlah sensitif terhadap perubahan salinitas dan suhu. Dalam usaha budidaya, sangat

perlu memperhatikan kualitas airnya jangan sampai terjadi fluktuatif yang sangat tinggi terhadap salinitas dan suhunya.

## 7. Distribusi dan Penyebaran Lobster

Lobster atau udang karang (*Panulirus sp*) hidup pada beberapa kedalaman tergantung pada jenis spesies dan lingkungan yang cocok. Lobster (*Panulirus sp*) dapat hidup pada kedalaman 5 – 30 meter (Hasrun, 1996). Udang karang berduri mempunyai penyebaran yang sangat luas mulai dari daerah temperate hingga daerah tropik (45° lintang utara sampai 45° lintang selatan). Hidup mulai dari daerah intertidal sampai perairan yang dalam. Banyak spesies yang hidup pada substrat yang berbatu-batu, lumpur atau pasir dan membuat lubang. Palinuridae menyukai hidup pada lubang atau celah-celah batu karang serta dasar dari terumbu karang. Jenis-jenis udang ini menyebar dari daerah litoral sampai kedalaman 400 m di daerah tropik dan sub tropik.

Keanekaragaman jenis *Panulirus sp* di perairan daerah tropika lebih besar dari pada di daerah sub-tropika, tetapi kelimpahannya relatif rendah. Lobster Hijau (*Panulirus versicolor*) hidup pada perairan terumbu karang sampai pada kedalaman beberapa meter.

Lobster biasanya mendiami tempat-tempat yang terlindung di antara batu-batu karang dan jarang ditemukan dalam kelompok yang berjumlah besar dan banyak terdapat di perairan barat Sumatera, selatan Jawa, perairan Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Halmahera.



## B. Aspek Ekonomi Sosial Nelayan

### 1. Pengertian Nelayan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian nelayan adalah orang atau masyarakat yang mata pencaharian utama utamanya menangkap ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan menurut UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil mempunyai definisi berbeda yaitu nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari begitu juga menurut Siambo (2010). Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan, ikan disini adalah binatang air lainnya dan tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkat alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan (Satria, 2015).

Ditjen Perikanan mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan yaitu:

- a. Nelayan penuh, yaitu nelayan / petani ikan yang seluruh waktunya digunakan untuk melakukan operasi penangkapan / pemeliharaan ikan / binatang air lainnya / tanaman air. Nelayan kategori ini tidak mempunyai pekerjaan lainnya selain menangkap ikan, biasanya mereka yang hidup dan tinggal di wilayah pesisir serta sudah turun temurun dari keluarganya.

- b. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan / petani ikan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan / pemeliharaan. Nelayan kategori ini bisa jadi mempunyai pekerjaan lain.
- c. Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan/ petani ikan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan/ pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air.

Charles mendefinisikan tipologi nelayan berdasar pada unsur ekologi (lingkungan), pada human sistem dan aktivitas perikanan menjadi empat kategori nelayan yaitu (Satria, 2015):

- a. *Subsistence fisher*, nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Nelayan dalam kategori ini lebih banyak sebagai nelayan tradisional yang melakukan penangkapan dalam sehari dengan kapal ukuran kecil dan alat tangkap yang sederhana.
- b. *Native indigenous aboriginal fisher*, kelompok nelayan yang mempunyai pola aktivitas nelayan tradisional dan seringkali hanya sebagai nelayan subsisten. Nelayan kategori ini hampir sama dengan *Subsistence fisher*, untuk mereka sendiri dan keluarga akan tetapi juga sedikit memperdagangkan hasil tangkapan mereka.
- c. *Recreational fisher*, nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai rekreasi saja.
- d. *Commercial fisher*, nelayan yang menangkap komoditas perikanan dalam memenuhi pasar domestik maupun ekspor, yang tergolong menjadi dua kategori yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri.



Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- b. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan orang lain.
- c. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

## 2. Nelayan dalam Stratifikasi Sosial Ekonomi

Menurut Kusnadi (2009), dalam perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen melainkan heterogen. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam. Dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumberdaya ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir, masyarakat pesisir terkelompok sebagai berikut:

- a. Pemanfaat langsung sumberdaya lingkungan, seperti nelayan (yang pokok), pembudidaya ikan di perairan pantai (dengan jaring apung atau karamba), pembudidaya rumput laut/mutiara, dan petambak.
- b. Pengolah hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi/krupuk ikan/tepung ikan, dan sebagainya, dan;

- c. Penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik toko atau warung, pemilik bengkel (montir dan las), pengusaha angkutan, tukang perahu dan buruh kasar (*manol*).

### 3. Nelayan Berdasarkan Penggolongan Sosialnya

Berdasarkan penggolongan sosialnya nelayan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat ini terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar di mana jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, dan nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi modern yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari nelayan tradisional.

Kemudian dari perbedaan sumber daya, latar belakang sampai ekonomi membuat nelayan dapat dibagi menjadi beberapa kategori menurut kepemilikan kapalnya yaitu:

- i. Nelayan pemilik, yaitu nelayan yang memiliki kapal perahu atau kapal penangkap ikan dan dia sendiri ikut serta atau tidak ikut ke laut untuk memperoleh hasil laut.



- ii. Nelayan juragan, yaitu nelayan yang membawa kapal orang lain tetapi ia tidak memiliki kapal.
- iii. Nelayan buruh, yaitu nelayan yang hanya memiliki faktor produksi tenaga kerja tanpa memiliki perahu penangkap ikan.

Nelayan adalah orang/individu yang aktif dalam melakukan penangkapan ikan dan binatang air lainnya. Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan terdetermin juga besarnya pendapatan yang diterima oleh nelayan yang nantinya sebagian besar digunakan untuk konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya.

### C. Pelarangan Penangkapan Benih Lobster beserta Dampaknya

Berdasarkan fenomena adanya penangkapan benih lobster akibat tingginya permintaan ekspor, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memandang perlu untuk melakukan pengaturan mengenai penangkapan benih lobster dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP). KKP telah menerbitkan Permen KP No 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan tujuan untuk mengelola potensi sumberdaya Crustacea. Permen KP 56/2016 pada Pasal 2 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan Harmonized System Code Kepiting dan Rajungan dalam kondisi bertelur, selanjutnya Pasal 3 (ayat 1) dijelaskan bahwa

penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dapat dilakukan dengan ukuran:

- a. Lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas delapan sentimeter);
- b. Kepiting (*Scylla spp*) dengan ukuran lebar karapas >15cm (di atas lima belas sentimeter); dan
- c. Rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).

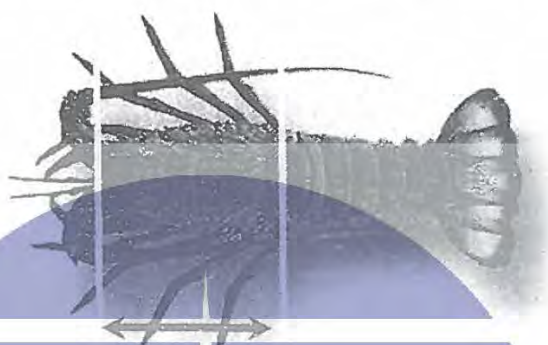
Permen tersebut disempurnakan dengan Permen tahun berikutnya yaitu Permen KP 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Permen KP 56/2016 pada Pasal 2 Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *armonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. Ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Karapas adalah cangkang keras yang melindungi organ dalam pada tubuh *Crustacea*. Karapas merupakan penutup *sefalothoraks* yang tersusun dari zat tanduk atau kitin yang tebal. Fungsi karapas adalah untuk melindungi organ-organ bagian dalam seperti insang, alat pencernaan termasuk organ hepatopankreas, jantung dan organ reproduksi (Fauzi, 2013). Dalam



Lampiran Permen KP 56/2016 dicantumkan cara pengukuran panjang karapas lobster yang menjadi batas ukuran dimaksud seperti gambar 2.9.



Gambar 2.9. Cara Pengukuran Panjang Karapas Lobster sesuai Lampiran Permen KP 56/2016

Penangkapan benih lobster untuk budidaya juga dilarang menurut Peraturan Menteri ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya. Dan pada ayat (2) benih lobster yang ditangkap dalam keadaan hidup wajib dilepas, bila yang tertangkap dalam keadaan mati dilakukan pencatatan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

#### **D. Bantuan Prasarana Budidaya sebagai Kompensasi**

##### **1. Tujuan penggunaan bantuan**

Kompensasi pelaksanaan Permen KP 56/2016 berupa pemberian bantuan prasarana dan sarana budidaya adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi dampak ekonomi yang menimpa nelayan eks penangkap benih lobster. Penggunaan bantuan bertujuan untuk pelestarian sumber daya lobster dan mengembalikan usaha penangkapan

benih lobster kepada kegiatan awal sebagai pembudidaya. Sasaran bantuan di Pulau Lombok adalah tersalurkannya 2.246 paket bantuan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang beralih usaha ke penangkap benih lobster.

## 2. Indikator Keberhasilan

Dalam petunjuk teknis bantuan sarana pengankapan ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017 menyebutkan bahwa indikator keberhasilan program pemberian bantuan ini adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada atau berkurangnya nelayan yang menangkap benih lobster
- b. Meningkatnya produksi budidaya hasil bantuan kompensasi bagi nelayan eks penangkap benih lobster.

## 3. Pengertian

Dalam petunjuk teknis bantuan kompensasi ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kelompok pembudidaya ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
- b. Kelompok pembudidaya berbadan hukum adalah badan hukum dalam bentuk perkumpulan pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk



meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk koperasi.

- c. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya.

## E. Evaluasi Kebijakan

### 1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji bagaimana kebijakan tersebut tingkat kegagalan dan keberhasilannya, keefektifan dan keefisienannya. William N. Dunn menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi kebijakan merupakan proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan, Badjuri dan Yuwono (2002) membuat tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :

#### 1. *Input* (masukan)

Masalah kebijakan publik timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik, yaitu suatu keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan publik tersebut, yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan

masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan publik baru. Fokus penilaian adalah sebagai berikut : apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? Berapakah SDM (sumber daya manusia), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan ?

### 2. *Process* (proses)

Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan, bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?

### 3. *Outputs* (hasil)

Produk kebijakan publik berupa peraturan, Undang-Undang dan Perda yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Fokus penilaian adalah sebagai berikut : apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik? Berapa orang yang berhasil mengikuti program / kebijakan tersebut?



#### 4. *Outcomes* (dampak)

Kebijakan publik berisikan hal yang positif dan negatif terhadap target group. Fokus penilaian adalah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? Adakah dampak negatifnya? Seberapa seriuskah?

Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003) sebagai berikut :

- a. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- c. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn (2003) mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya pemerataan dalam kebijakan

publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

- d. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- e. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Evaluators kebijakan harus mengetahui secara jelas aspek-aspek apa yang perlu dikajinya. Di samping itu harus mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu dikejanya untuk memperoleh data yang valid. Selain mengetahui teknik analisis yang tepat untuk melakukan evaluasi. Sejumlah metode dapat digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi kebijakan,



namun hampir semua teknik yang ada dapat juga digunakan dalam hubungannya dengan metode-metode evaluasi lainnya.

## 2. Dampak Kebijakan

Sebuah kebijakan mau tidak mau pasti akan menimbulkan dampak, baik itu berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif merupakan dampak yang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif adalah dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi. Dampak kebijakan merupakan keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata.

Menurut Agustino (2006) dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi :

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dengan melibatkan masyarakat. Pertama-tama harus didefinisikan siapa yang akan terkena pengaruh kebijakan. Lebih lanjut lagi harus dicatat juga bahwa kebijakan dapat mempunyai akibat yang diharapkan atau yang tidakdiharapkan.
2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain, atau disebut juga dengan eksternalitas atau *spillover effect*.
3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh di masa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang pada saat ini.
4. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa pengalaman dari suatu

komunitas atau beberapa anggota di antaranya. Seperti biaya sering tidak dipertimbangkan dalam pembuatan evaluasi kebijakan setidaknya sebagian ada yang menentang perhitungannya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan mempertajam konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesis serta menghindari terjadinya pengulangan penelitian, berikut ini resume beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat dalam Tabel 2.1.





Tabel 2.1.  
Resume Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Zakky Fajari, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto (2016)	Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster ( <i>Pamulirus spp</i> ), Kepiting ( <i>Scylla spp</i> ), dan Rajungan ( <i>Portunus pelagicus spp</i> ) sebagai Upaya Pelestarian Sumber Daya Hayati Laut	Deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif	Kesimpulan penelitian ini ialah Pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut diatas telah berlaku dan sudah terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015 di wilayah Indonesia. Tetapi masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya, yaitu para nelayan merasa dirugikan karena nelayan merasa penghasilannya berkurang. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji, mensosialisasi, dan memberi mata pencaharian alternatif yang baik untuk nelayan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Menteri dengan benar
2.	Erlania, Nyoman Radiarta, Joni Haryadi (2016)	Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya : Studi Kasus Perairan Pulau Lombok	Deskriptif	Hasil kajian memperlihatkan bahwa kawasan perairan Pulau Lombok memiliki potensi benih lobster yang sangat besar. Adanya regulasi yang melarang penangkapan benih lobster menyebabkan berbagai dampak sosial ekonomi terhadap kehidupan masyarakat pesisir Pulau Lombok. Besarnya potensi benih lobster membuka peluang untuk pengembangan aktivitas budidaya pembesaran lobster, sehingga masyarakat mendapatkan mata pencaharian alternatif sebagai pengganti aktivitas menangkap benih. Namun hal ini harus didukung dengan peninjauan dan penyesuaian kembali PERMEN KP No. 1 tahun 2015 terkait larangan penangkapan lobster khususnya ukuran benih, sehingga masyarakat diijinkan untuk menangkap benih lobster untuk kebutuhan budidaya.

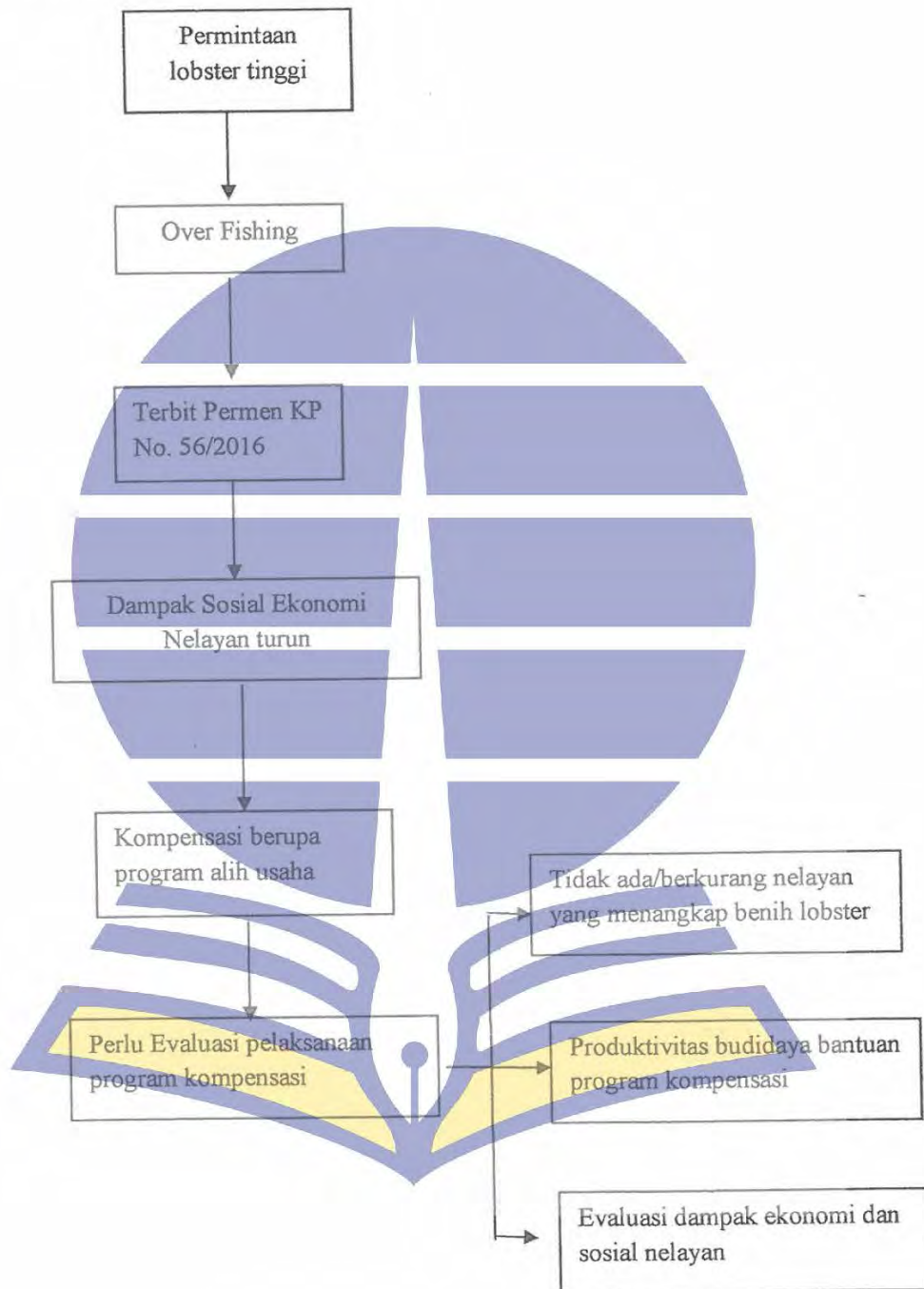
3	Cornelia Mirwantini Witomo dan Nurlaili (2015)	Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Bibit Lobster di Perairan Lombok	Deskriptif eksploratif	<p>Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penangkapan bibit lobster sudah menjadi mata pencaharian utama nelayan di Lombok Tengah dan Lombok Timur dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Penangkapan bibit lobster semakin berkembang karena permintaan akan bibit lobster masih terbuka lebar dan bibit lobster yang mudah tertangkap di perairan Lombok selatan tanpa menggunakan alat tangkap yang modern. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh Permen KP No. 1 tahun 2015 bagi nelayan penangkap bibit lobster adalah menurunnya pendapatan nelayan karena tidak dapat lagi - menjual hasil tangkapan di bawah 300 gram dan berdampak kehidupan nelayan seperti menjual barang-barang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p>
4	Furqan, Tri Wiji Nurani, Eko Sri Wiyono, Deni Achmad Soeboer (2017)	Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster <i>Panulirus spp.</i> di Pelabuhan Ratu	Content analysis dan sequential explanatory design	<p>Analisis kebijakan menunjukkan ketentuan ukuran layak tangkap dalam kebijakan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016 tidak melihat kondisi biologis dari masing-masing spesies. Kendala terkait implementasi kebijakan di wilayah Perairan Teluk Palabuhanratu yaitu kurangnya sosialisasi, dan sumberdaya kebijakan. Tingkat pengetahuan nelayan terhadap kebijakan sudah cukup, namun nelayan merasa bahwa penangkapan benih lobster tidak mengganggu keberlanjutan lobster, sehingga nelayan menolak kebijakan tersebut. Sebaiknya kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi di lapangan dengan informasi yang mendukung untuk keberlanjutan sumberdaya ikan, agar tepat sasaran dan memberi manfaat sosial</p>



				ekonomi masa kini dan masa depan.
5	Khairani Hilal, Yuli Fachri (2015)	Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015	Studi pustaka dengan analisis perspektif merkantili sme	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tujuan Indonesia melarang ekspor benih lobster ke Vietnam adalah untuk mengurangi jumlah ekspor benih lobster karena populasi lobster di alam akan terbatas.
6	Furqan (2017)	Kebijakan Pelarangan Penangkapan Lobster Panulirus spp. dan Implikasinya terhadap Perikanan Lobster di Palabuhan Ratu	Content analysis, deskriptif dengan mix method (sequential explanato ry design) dan analisis SWOT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kebijakan terkait penangkapan lobster yang terjadi di Palabuhanratu melingkupi lobster ukuran konsumsi dan benih lobster. Tingkat pengetahuan nelayan terhadap kebijakan sudah cukup, namun nelayan merasa bahwa penangkapan lobster kurang dari <i>legal size</i> dan benih lobster tidak mengganggu keberlanjutan lobster, sehingga nelayan menolak kebijakan PERMEN KP No.1/2015 <i>jo</i> PERMEN KP No 56/2016.



### G. Kerangka Berpikir



Gambar 2.10. Kerangka Berpikir



## BAB III. METODOLOGI

### A. Rancangan Penelitian

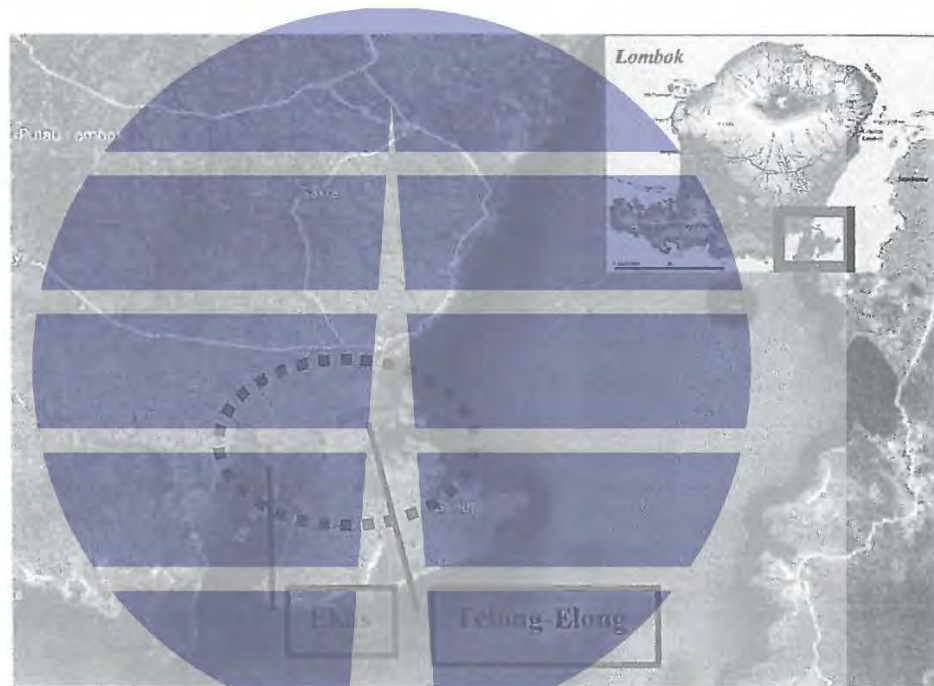
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan dengan cara mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2010). Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan pemberian kompensasi pelaksanaan Permen KP 56/2016 serta dampaknya terhadap aspek ekonomi dan sosial nelayan eks penangkap benih lobster di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini bersifat evaluatif yaitu melakukan evaluasi terhadap program pemberian kompensasi dari penerapan Permen KP 56/2016 beserta dampaknya terhadap nelayan penangkap benih lobster.

Responden yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah para nelayan eks penangkap benih lobster, penyuluh perikanan, dan pejabat dinas terkait baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kawasan Teluk Ekas dan Telong-Elong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan pada Bulan Oktober – Nopember 2018. Dua

kawasan teluk ini disamping sebagai lokasi penangkapan benih juga merupakan lokasi budidaya laut baik kerapu, bawal bintang maupun pembesaran lobster dan tambak udang vanamei. Lokasi penelitian dapat dilihat seperti Gambar 3.1. berikut :



Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian Telong-elong dan Teluk Ekas

### C. Metode Pengumpulan Data

Ada dua jenis sumber data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen maupun laporan tertulis (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan, wawancara, dan kuisioner untuk



Tabel 3.1. Variabel Penelitian, Indikator, dan Data yang Dibutuhkan.

No.	Variabel	Indikator	Data yang dibutuhkan	Jenis data	Sumber
1.	Tingkat keberhasilan pelaksanaan program kompensasi.	a. Tidak ada atau berkurangnya nelayan yang menangkap benih lobster dibandingkan saat sebelum bantuan kompensasi	1) Jumlah nelayan eks penangkap benih lobster	Sekunder	Dinas KP
			2) Jumlah nelayan penerima dana kompensasi dan jenis budidaya yang dilakukan	Sekunder	Dinas KP
			3) Aktivitas nelayan eks penangkap benih lobster	Primer	Nelayan
			4) Ada tidaknya aktivitas penangkapan benih lobster	Primer dan sekunder	Nelayan dan BKIPM
	b. Produktivitas hasil budidaya dan aktivitas budidaya program bantuan kompensasi	1) Jumlah Nelayan penerima dana kompensasi dan jenis budidaya	Sekunder	Dinas KP	
		2) Jumlah produksi hasil budidaya perikanan setiap kali panen	Primer	Nelayan	
		3) Kondisi kemampuan nelayan dalam budidaya perikanan yang dilakukannya	Primer dan sekunder	Nelayan dan Dinas KP	
		4) Ada tidaknya pendampingan dan penyuluhan yang diterima	Primer	Nelayan dan Dinas KP	
		5) Kesesuaian jenis budidaya dengan keahlian nelayan	Primer	Nelayan	
		6) Kecukupan sarana budidaya	Primer	Nelayan	
7) Kesesuaian sarana budidaya	Primer	Nelayan			
	8) Pemasaran hasil budidaya perikanan	Primer	Nelayan		
	9) Masalah dalam pelaksanaan budidaya	Primer	Nelayan		
2.	Dampak pelaksanaan program bantuan kompensasi terhadap aspek ekonomi dan sosial nelayan eks penangkap benih lobster	a. Pendapatan nelayan	1) Pendapatan per bulan 2) Jumlah pengeluaran per bulan	Primer Primer	Nelayan Nelayan
		b. Kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	1) Jumlah tanggungan keluarga 2) Kecukupan pemenuhan kebutuhan sehari-hari	Primer Primer	Nelayan Nelayan
	c. Kemampuan nelayan dalam mengakses pendidikan bagi keluarganya.	1) Jumlah anak usia sekolah	Primer	Nelayan	
		2) Tingkat pendidikan anak	Primer	Nelayan	
		3) Kemampuan membayar biaya sekolah	Primer	Nelayan	
4) Kemampuan melanjutkan sekolah	Primer	Nelayan			
5) Harapan terhadap tingkat pendidikan anak	Primer	Nelayan			



program kompensasi bantuan alih usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisisioner dan wawancara terhadap nelayan eks penangkap benih lobster dan observasi di lapangan.

- b. Kondisi sosial berupa kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk keluarganya, serta kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisisioner, wawancara, dan observasi di lapangan.



memperoleh data yang aktual sesuai dengan kondisi dan perkembangan di lapangan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari data dan dokumen dari dinas terkait dan BKIPM Mataram serta dari studi pustaka.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program kompensasi untuk pemberian mata pencaharian alternatif bagi nelayan.

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan indikator sebagai berikut :

- a. Tidak ada atau berkurangnya aktivitas penangkapan benih lobster dibandingkan saat sebelum bantuan kompensasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada petugas dari dinas terkait, kuisisioner untuk eks penangkap benih lobster, serta data sekunder dari BKIPM Mataram. Data dibandingkan antara sebelum dan sesudah adanya program kompensasi.

- b. Produktivitas hasil budidaya program bantuan kompensasi. Data yang dikumpulkan berupa kondisi kemampuan nelayan dalam melakukan budidaya, pelatihan dan pendampingan dari dinas terkait, hasil produksi budidaya, hingga pemasaran dan harga jual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada petugas dari dinas terkait dan kuisisioner untuk eks penangkap benih lobster.

2. Dampak pelaksanaan program bantuan kompensasi terhadap aspek ekonomi dan sosial nelayan eks penangkap benih lobster. Variabel ini diukur dengan dua indikator :

- a. Pendapatan nelayan yang dibandingkan antara masa terbit dan berlakunya Kepmen tanpa kompensasi, dan setelah berlakunya

	d. Kemampuan nelayan dalam mengakses pelayanan kesehatan bagi keluarganya.	1) Keanggotaan BPJS dan kemampuan membayar iuran 2) Kemampuan membayar biaya pengobatan anggota keluarga 3) Tindakan jika anggota keluarga sakit	Primer  Primer  Primer	Nelayan  Nelayan  Nelayan
	e. Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier	1) Kepemilikan tabungan 2) Kemampuan membeli kebutuhan sekunder 3) Kemampuan memiliki aset	Primer Primer  Primer	Nelayan Nelayan  Nelayan





## E. Pengolahan Data dan Analisis

### 1. Pemilihan Sampel

Pengambilan data dari kuisioner dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini responden dipilih nelayan eks penangkap benih lobster. Penentuan responden dipilih dengan metode proporsional berdasarkan jenis budidaya yang dilakukan oleh nelayan. Dari populasi nelayan eks penangkap benih lobster di Kabupaten Lombok Timur 1.074 RTP atau 96 kelompok diambil sampel sejumlah 100 nelayan. Penentuan jumlah sampel ini berdasarkan metode alokasi proporsional (Nazir, 2014).

Jumlah sampel yang diambil adalah 100 nelayan atau sekitar 10% dari populasi yang terdiri terdiri dari 13 orang budidaya rumput laut cottoni sistem rakit, 19 orang budidaya bawal bintang, 42 orang budidaya kerapu tikus, 9 orang budidaya kerapu cantang, 2 orang budidaya kerapu cantik, 2 orang budidaya lele, 6 orang budidaya rumput laut cottoni sistem longline, 2 orang budidaya bandeng, 2 orang budidaya udang vanamei, dan masing-masing 1 orang untuk budidaya kerapu macan, nila, dan rumput laut spinosum sistem rakit seperti Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Jumlah Sampel Berdasarkan Jenis Budidaya

No.	Jenis Budidaya	Jumlah Sampel	Populasi	Keterangan
1.	Budidaya Kerapu Tikus	42	450	
2.	Budidaya Bawal Bintang	19	205	
3.	Budidaya RL Cottoni Sistem Rakit	13	139	
4.	Budidaya Kerapu Cantang	9	94	

5.	Budidaya RL Cottoni Sistem Longline	6	67	
6.	Budidaya Kerapu Cantik	2	21	
7.	Budidaya Bandeng	2	18	
8.	Budidaya Lele	2	30	
9.	Budidaya Udang Vanamei	2	20	
10.	Budidaya Nila	1	14	
11.	Budidaya Kerapu Macan	1	15	
12.	Budidaya RL Spinosum	1	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>1.074</b>	

## 2. Analisis Data

### a. Uji-T

Untuk menganalisis penurunan frekuensi menangkap benih lobster dan dampak ekonomi dalam penelitian ini menggunakan Uji-t (*T-Test*). Menurut Nazir (2014) bahwa salah satu cara untuk menguji beda antara dua *mean* adalah dengan menggunakan uji-t. Uji-t digunakan untuk mengetahui perbedaan frekuensi nelayan menangkap benih lobster antara sebelum dan sesudah kompensasi, serta perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya bantuan kompensasi dan sesudah adanya bantuan kompensasi. Dalam penelitian ini, uji T dilakukan dengan program SPSS.

Pada analisis uji-T ini, hipotesis dibuat untuk dua indikator berikut :

- 1) Hipotesis untuk frekuensi bulanan nelayan menangkap benih lobster  
 $H_0$  : tidak ada perbedaan frekuensi bulanan nelayan menangkap benih lobster sebelum dan sesudah kompensasi.

$H_a$  : ada perbedaan frekuensi bulanan nelayan menangkap benih lobster sebelum dan sesudah kompensasi.

2) Hipotesis untuk penghasilan bulanan nelayan

$H_0$  : tidak ada perbedaan penghasilan bulanan nelayan sebelum dan sesudah kompensasi.

$H_a$  : ada perbedaan penghasilan bulanan nelayan sebelum dan sesudah kompensasi.

Pengujian T-tes dilakukan dengan tingkat signifikansi 95%.

Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Pengambilan kesimpulan berdasarkan t tabel

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

2) Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi

Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima

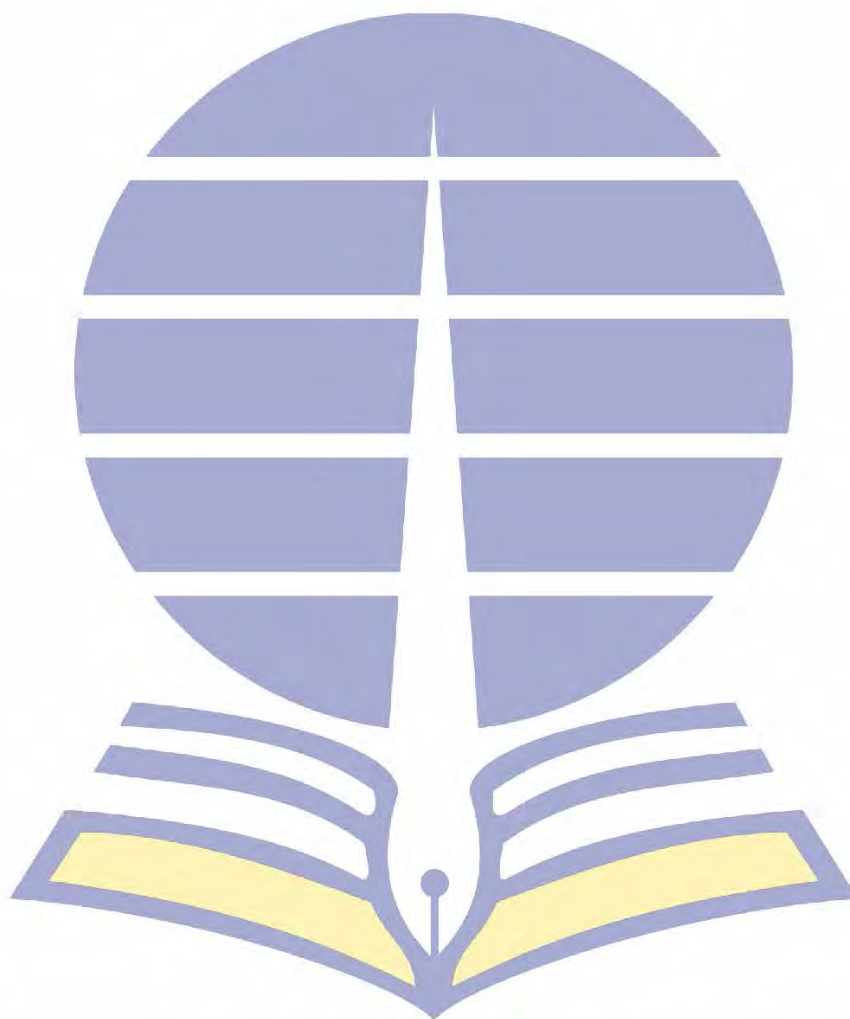
Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

b. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan pemaparan atau penggambaran dengan jelas keadaan atau kondisi di lapangan terkait dengan aktivitas nelayan dalam melakukan budidaya hasil bantuan maupun aktivitas penangkapan benih lobster yang dapat menggambarkan hasil dari bantuan kompensasi tersebut.



Analisis ini dilakukan pada parameter keberhasilan berupa tidak ada atau menurunnya aktivitas penangkapan benih lobster, proses budidaya perikanan dan dampak terhadap aspek ekonomi sosial nelayan sesudah bantuan kompensasi diberikan.



## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Objek Penelitian

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang memiliki beberapa kawasan sebagai sumber benih lobster. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, di mana pada bagian pesisir selatan dari wilayah ini terutama di perairan Teluk Ekas dan Teluk Telong-Elong merupakan lokasi penghasil benih lobster. Secara umum jenis benih lobster yang ditemukan di lokasi ini adalah jenis lobster pasir dan lobster mutiara (DKP NTB, 2015).

Menurut Suastika dkk (2008) kegiatan penangkapan benih lobster di Pulau Lombok sudah berlangsung lama yaitu sejak awal 1990-an di mana pada awalnya penangkapan benih lobster ini dilakukan untuk suplai benih dalam budidaya lobster oleh masyarakat menggunakan keramba jaring apung. Menurut DKP NTB (2015), usaha penangkapan benih lobster di Kabupaten Lombok Timur bertujuan untuk dilakukan usaha pembesaran sendiri dan usaha penangkapan benih terus berkembang seiring perkembangan usaha pembesaran lobster di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2001 dan saat itu harga benih lobster berkisar antara Rp. 2.000,- s/d 4.000 perekor. Usaha Penangkapan benih lobster mengalami perkembangan pesat mulai tahun 2012 karena adanya permintaan benih lobster dari Vietnam dalam jumlah yang besar dengan harga yang cukup tinggi, tingginya harga tersebut membuat masyarakat yang berada di kawasan pesisir Kabupaten Lombok Timur baik nelayan maupun pembudidaya ikan berlomba-lomba melakukan usaha penangkapan benih lobster, karena mereka menganggap itu merupakan

karapas > 8 cm atau setara dengan berat 200 gram, dan benih yang ditangkap tidak boleh untuk kebutuhan budidaya sekalipun. Sementara para nelayan Lombok Timur menangkap benih lobster dengan ukuran 1-4 gram di samping dijual untuk ekspor juga untuk kebutuhan pembesaran lobster oleh pembudidaya di Lombok Timur.

Dari hasil indentifikasi pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016 secara umum akibat dari terbitnya Permen KP tentang pelarangan menangkap benih lobster tersebut, terjadi penentangan dari nelayan penangkap benih lobster akibat menurunnya penghasilan dari hasil menjual hasil tangkapan benih lobster. Keramba Jaring Apung (KJA) atau sarana budidaya yang di miliki tidak terurus dan banyak tidak termanfaatkan. Menghadapi kondisi ini, hasil audiensi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan pihak DPRD NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur disampaikan bahwa pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membantu mengatasi dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tersebut dengan bantuan sarana dan prasarana budidaya, bantuan ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan nelayan penangkap benih lobster (hasil wawancara dengan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, 2018).



Penyediaan sarana budidaya di Kabupaten Lombok Timur ini memiliki dua tujuan yaitu menghindari meluasnya dampak keluarnya Permen-KP nomor 1 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan Permen-KP nomor 56 Tahun 2016, dan sebagai upaya solusi terhadap para nelayan penangkap benih lobster dan pembudidaya dari 1.074 orang nelayan yang bermukim di sekitar kawasan pesisir pantai Kabupaten Lombok Timur agar dapat melakukan aktivitas penangkapan dan budidaya ikan kembali.

Hasil wawancara dengan petugas lapangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, upaya mitigasi terhadap dampak pelarangan penangkap lobster melalui pengembangan sarana budidaya ikan ini ditujukan untuk nelayan penangkap benih lobster di Kecamatan Jerowaru kawasan Teluk Jukung, Teluk Serewi dan Teluk Ekas yang memiliki potensi budidaya laut yang akan mendapat bantuan mitigasi berupa sarana budidaya.

Bantuan sarana budidaya yang direncanakan dari hasil tinjauan lapangan sesuai dengan kebutuhan nelayan tersebut yaitu berupa paket budidaya bawal bintang, budidaya rumput laut, budidaya kerapu, budidaya udang vanname, budidaya ikan lele, budidaya ikan nila dan budidaya bandeng. Paket budidaya tersebut berdasarkan kesepakatan dengan nelayan mereka akan diberikan bantuan dalam bentuk kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang yang akan mengelola paket bantuan sarana budidaya yang dilengkapi dengan bahan dan alat. Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tidiperoleh 96 kelompok dengan 1.074 RTP, masing-masing anggota kelompok (RTP) akan

memperoleh paket budidaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota.

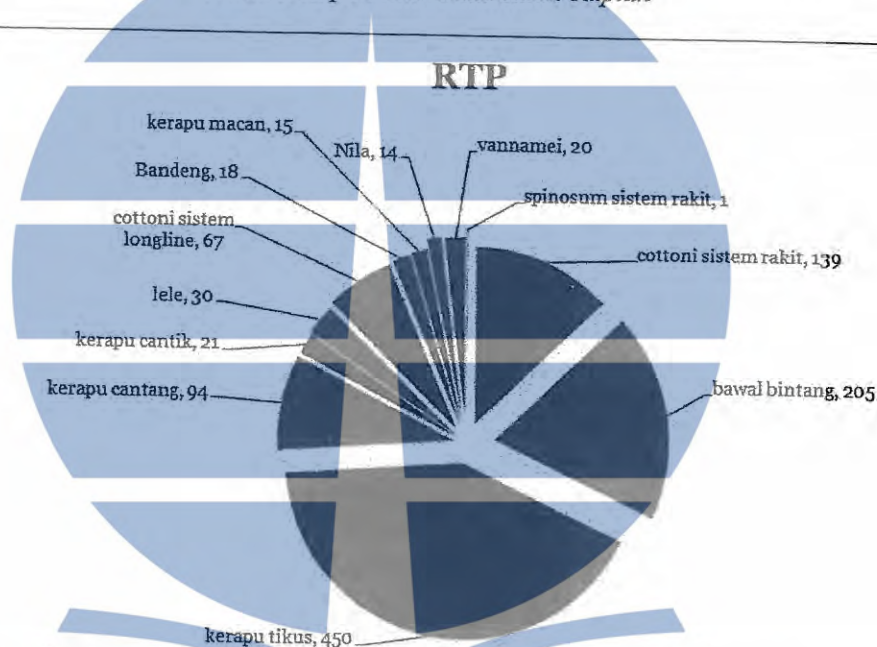
Upaya mitigasi terhadap dampak pelarangan penangkapan lobster berupa kompensasi bantuan sarana budidaya ikan untuk nelayan di Kabupaten Lombok Timur ini membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 22.253.168.500,- (*Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan rincian pembiayaan seperti pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1.

Tabel 4.1. Daftar Jumlah Paket Budidaya dan Nilai Bantuan per Jenis Budidaya.

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Sarana dan Prasarana Budidaya Bawal Bintang	205 Paket	20.330.000	4.167.650.000
2	Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut Sistem Longline	67 Paket	14.649.000	981.483.000
3	Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut Sistem Rakit	139 Paket	19.835.000	2.776.900.000
4	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Bandeng	18 Paket	20.080.000	341.360.000
5	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele	30 Paket	19.866.500	595.995.000
6	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan nila	14 Paket	19.240.000	269.360.000
7	Sarana dan Prasarana Budidaya Kerapu tikus	450 Paket	22.422.275	10.090.023.750
8	Sarana dan Prasarana Budidaya Kerapu Cantang, Cantik dan Macan	105 Paket	20.532.275	2.155.888.875



9	Sarana dan Prasarana Budidaya Udang Vanname	20	Paket	19.420.000	388.400.000
10	Sarana dan Prasarana transportasi budidaya rumput laut (sampan dan mesin)	19	Paket	25.584.625	486.107.875
<b>JUMLAH</b>					<b>22.253.168.500</b>
<i>Terbilang : Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah</i>					



Gambar 4.1. Grafik Jumlah dan Jenis Budidaya Bantuan Kompensasi

Kebutuhan masing-masing pembudidaya berbeda-beda sesuai dengan jenis budidaya yang akan dilaksanakan, adapun rincian bantuan sarana budidaya yang diterima adalah sebagai berikut :

#### 1. Bantuan Budidaya Bawal Bintang.

Kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 sebagai alih kegiatan bagi para nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya, salah satunya adalah sarana budidaya bawal bintang. Budidaya



bawal bintang menjadi salah satu komoditas baru unggulan perikanan budidaya laut yang tengah dikembangkan, dan menjadi salah satu komoditas alternatif budidaya laut. Harga jualnya cukup bersaing, sekitar Rp. 50 ribu – 70 ribu per kilogram, waktu budidayanya juga lebih cepat dibanding kerapu yaitu 6 bulan dari ukuran benih tebar serta lebih mudah dalam pemeliharannya.

Bantuan budidaya bawal bintang yang diperoleh oleh nelayan eks penangkap benih lobster di Lombok Timur berupa benih dengan ukuran 5-6 cm berjumlah 620 ekor, Pakan starter sebanyak 80 Kg, Pakan Grower 120 Kg, Pakan Finisher 200 Kg, Vitamin C 5 bungkus, termasuk pemberat jaring, tali PE 7 mm, jaring kasar, jaring halus dan jaring penutup dengan jumlah total bantuan untuk masing-masing pembudidaya bawal bintang sebesar Rp. 20.330.000 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribuh Rupiah). Rincian dari jenis dan jumlah bantuan budidaya bawal bintang seperti pada Tabel 4.2.

Tabel. 4.2. Jumlah dan Jenis Bantuan untuk Budidaya Bawal Bintang.

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga	Total
1	Benih Bawal Bintang 5-6 cm	Ekor	620	3.000	1.860.000
2	Pakan Starter	Kg	80	22.000	1.760.000
3	Pakan Grower	Kg	120	21.000	2.520.000
4	Pakan Finisher	Kg	200	21.000	4.200.000
5	Vit, C merk C	bungkus	5	50.000	250.000
6	Pemberat Jaring 5 kg cor semen dilengkapi tali PE 7mm sepanjang 1 mtr	Unit	8	30.000	240.000
7	Jaring kasar ukuran 3X3X3,5 mtr. Mesh size 2,5 cm	Unit	2	2.500.000	5.000.000

8	Jaring halus ukuran 3X3X3,5 mtr. Mesh size 0,95 cm	Unit	2	2.000.000	4.000.000
9	Jaring penutup merk Mesh size 2,5 cm	Unit	2	250.000	500.000
<b>Jumlah</b>					<b>20.330.000</b>

## 2. Bantuan Sarana Budidaya Kerapu Cantang, Cantik, dan Macan

Kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 sebagai alih kegiatan bagi para nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya, salah satunya adalah sarana budidaya kerapu. Budidaya Kerapu Cantang, Cantik dan Macan jumlah keseluruhan yang mendapat bantuan sarana berjumlah 105 pembudidaya masing-masing memperoleh benih sebanyak 500 ekor dengan ukuran benih 8-9 cm, Pakan, dan sarana budidaya lainnya dengan rincian seperti Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Jumlah dan Jenis Bantuan Budidaya Kerapu Cantang, Kerapu Cantik dan Kerapu Macan

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Benih Kerapu 8-9 cm	Ekor	500	7.360	3.680.000
2	Pakan Starter	Kg	60	19.250	1.155.000
3	Pakan Grower	Kg	100	19.250	1.925.000
4	Vit, C 100 gr/bungkus	bungkus	5	33.275	166.375
5	Pemberat Jaring 5 kg cor semen dilengkapi tali PE 7mm sepanjang 1 mtr	Unit	8	33.000	264.000
6	Jaring kasar ukuran 3X3X3,5 mtr. Mesh size 2,5 cm	Unit	2	2.662.000	5.324.000



7	Jaring halus ukuran 3X3X3,5 mtr. Mesh size 0,95 cm	Unit	2	1.996.500	3.993.000
8	Jaring penutup. Mesh size 2,5 cm	Unit	2	266.200	532.400
9	Gillnet sarana penangkap pakan rucah	Unit	1	3.492.500	3.492.500
<b>Jumlah</b>					<b>20.532.275</b>

### 3. Bantuan Sarana Budidaya Kerapu Tikus

Kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 sebagai alih kegiatan bagi para nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya, salah satunya adalah sarana budidaya bawal kerapu tikus. Budidaya kerapu tikus merupakan budidaya yang dominan dari jumlah budidaya yang menerima bantuan kompensasi, yaitu sebanyak 450 pembudidaya kerapu tikus atau sekitar 41.89 %. Jumlah dan jenis bantuannya hampir sama dengan yang diperoleh oleh pembudidaya kerapu macan, cantang dan cantik. Tetapi berbeda dari jumlah harganya untuk kerapu macan, cantang, dan cantik total harganya sebesar Rp. 20.532.275 sedangkan budidaya kerapu tikus total harga bantuan biaya yang diterima sebesar Rp. 22.422.275. Hal ini disebabkan perbedaan harga benih kerapu, benih kerapu tikus lebih mahal yaitu Rp. 12.680,00/benih sedangkan kerapu cantang, macan, dan cantik harga benihnya Rp. 7.360,00/benih. Untuk lebih jelasnya jumlah dan jenis bantuan untuk budidaya kerapu tikus dapat dilihat pada Tabel 4.4.



Tabel 4.4. Jumlah dan Jenis Bantuan Budidaya Kerapu Tikus

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Benih Kerapu tikus 8-9 cm	Ekor	500	12.680	6.340.000
2	Pakan Starter	Kg	60	19.250	1.155.000
3	Pakan Grower	Kg	60	19.250	1.155.000
4	Vit, C 100 gr/bungkus	bungkus	5	33.275	166.375
5	Pemberat Jaring 5 kg cor semen dilengkapi tali PE 7mm sepanjang 1 mtr	Unit	8	33.000	264.000
6	Jaring kasar ukuran 3X3X3,5 mtr. Mesh size 2,5 cm	Unit	2	2.662.000	5.324.000
7	Jaring halus ukuran 3X3X3,5 mtr. Mesh size 0,95 cm	Unit	2	1.996.500	3.993.000
8	Jaring penutup. Mesh size 2,5 cm	Unit	2	266.200	532.400
9	Gillnet sarana penangkap pakan rucah	Unit	1	3.492.500	3.492.500
<b>Jumlah</b>					<b>22.422.275</b>

#### 4. Bantuan Sarana Budidaya Ikan Lele

Kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 sebagai alih kegiatan bagi para nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya, salah satunya adalah sarana budidaya ikan lele. Jumlah RTP budidaya lele sebanyak 30 RTP atau 2,79 persen dari total penerima bantuan kompensasi. Bantuan budidaya ikan lele yang diterima oleh pembudidaya lele senilai Rp. 19.866.500,00 berupa benih lele ukuran 6-7 cm sebanyak 8.000 ekor, pakan, probiotik, dan sarana budiaya lainnya.

Budidaya lele yang dilakukan dengan sistem bioflok yaitu budidaya di lahan atau kolam terbatas dengan tingkat kepadatan yang tinggi dengan memanfaatkan mikroorganisme sebagai sumber pakan. Budidaya lele bioflok memiliki banyak keunggulan padat tebar dapat ditingkatkan dari 100 ekor/m<sup>3</sup> menjadi 1000 ekor/m<sup>3</sup>, waktu pemeliharaan juga dapat dipersingkat menjadi 75-90 hari saja dari sebelumnya 90-110 hari. Disamping itu penggunaan pakan lebih efisien FCR bisa mencapai 0,8. Artinya, untuk menghasilkan 1 kg ikan, cukup menghabiskan 0,8 kg pakan. Adapun jenis dan jumlah bantuan budidaya lele dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Lele

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Benih lele 6-7 cm	Ekor	8.000	350	2.800.000
2	Pakan apung Starter	Kg	120	12.000	1.440.000
3	Pakan apung Grower	Kg	240	12.000	2.880.000
4	Pakan apung Finisher	Kg	380	12.000	4.560.000
5	Probiotik 5 ltr/jerigen	Jerigen	1	330.000	330.000
6	Vit, C 100 gr/bungkus	bungkus	5	50.000	250.000
7	Mesin pompa merk Shimizu 3/4 inch	Unit	1	550.000	550.000
8	Selang 3/4 inch 25 mtr	Unit	1	16.500	16.500
9	Kolam terpal ukuran 2x4 mtr	Unit	8	880.000	7.040.000
<b>Jumlah</b>					<b>19.866.500</b>



## 5. Bantuan Sarana Budidaya Ikan Nila

Kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 sebagai alih kegiatan bagi para nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya, salah satunya adalah sarana budidaya ikan nila. Jumlah RTP untuk bantuan budidaya ikan nila sebanyak 14 RTP atau 1,30 persen dari jumlah keseluruhan penerima bantuan kompensasi. Bantuan budidaya ikan nila sama dengan bantuan budidaya lainnya yaitu menerima sejumlah sarana budidaya perikanan berupa benih, pakan dan probiotik. Bantuan yang diterima senilai Rp. 19.240.000,00 yang terdiri dari benih nila ukuran 7-cm sebanyak 6.000 ekor, pakan dengan jumlah keseluruhan 1.160 Kg (pakan apung starter, grower dan finisher), probiotik 5 liter dan vitamin C aquatik. Rincian bantuan budidaya ikan nila dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Ikan Nila

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Benih Nila 7-8 cm	Ekor	6.000	500	3.000.000
2	Pakan apung Starter	Kg	200	13.500	2.700.000
3	Pakan apung Grower	Kg	360	13.500	4.860.000
4	Pakan apung Finisher	Kg	600	13.500	8.100.000
5	Probiotik 5 ltr/ jerigen	Jerigen	1	330.000	330.000
6	Vit, C Aquatik 100 gr/bungkus	bungkus	5	50.000	250.000
<b>Jumlah</b>					<b>19.240.000</b>



## 6. Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut

Kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 sebagai alih kegiatan bagi para nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya, salah satunya adalah sarana budidaya rumput laut. Jumlah yang menerima bantuan untuk budidaya rumput laut berjumlah 207 RTP atau 19,27 persen dari total penerima bantuan. Bantuan budidaya rumput laut bagi para penangkap eks benih lobster terdiri dari 2 jenis menurut metode budidayanya, yaitu budidaya rumput laut *cottoni* dengan metode *longline* dan dengan rakit. Masing-masing mendapat bantuan senilai Rp. 14.649.000 dan Rp. 19.835.000 dalam bentuk bantuan bibit rumput laut dan sarana budidaya rumput laut. Untuk lebih jelasnya jumlah dan jenis bantuan yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

Tabel 4.7. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Rumput Laut Metode *Longline*

Metode Longline					
No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Bibit rumput laut	Kg	600	3.500	2.100.000
2	Tali frame 12 mm	Kg	23	41.000	943.000
3	Pelampung bola diameter 7 cm	Buah	21	70.000	1.470.000
4	Tali ikat PE 2 mm	Roll	2	40.000	80.000
5	Tali pelampung PE 5 mm	Kg	2	41.000	82.000
6	Upah buat tali ris PE 5 mm	Utas	50	5.000	250.000
7	Upah buat pengikat tali rafia	Kg	6	20.000	120.000

8	Tali ris PE 5 mm	Kg	70	41.000	2.870.000
9	Pemberat 3 karung 1 sak semen, 40 kg pasir laut (per buah)	Buah	80	30.000	2.400.000
10	Tali pemberat PE 12 mm	Kg	70	41.000	2.870.000
11	Upah ikat bibit	Ris	25	5.000	125.000
12	Upah tanam bibit	Ris	25	5.000	125.000
13	Upah pasang longline di laut	Unit	1	300.000	300.000
14	Pelampung botol 500 ml	Botol	1.250	600	750.000
15	Tali PE 4 mm pengikat pelampung botol 500 ml	Kg	4	41.000	164.000
<b>Jumlah</b>					<b>14.649.000</b>

Tabel 4.8. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Rumput Laut Metode Rakit

Metode Rakit (10 rakit per RTP)					
NO	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Bibit rumput laut	kg	1.000	3.500	3.500.000
2	Bambu panjang 8 mtr diameter 10 cm	batang	60	35.000	2.100.000
3	Tali pengikat PE 2 mm	kg	20	41.000	820.000
4	Upah membuat rakit bambu	unit	10	100.000	1.000.000
5	Pelampung bola diameter 35-36 cm	buah	10	80.000	800.000
6	Tali pelampung PE 10 mm	meter	60	5.000	300.000
7	Tali rafia	kg	10	25.000	250.000
8	Upah buat tali ris PE 4 mm	utas	700	1.500	1.050.000
9	Upah buat tali pengikat rafia	kg	10	20.000	200.000
10	Tali ris PE 4 mm	kg	40	41.000	1.640.000
11	Pemberat 3 karung 1 sak semen, 120 kg pasir laut (per buah)	buah	30	50.000	1.500.000



12	Tali pemberat PE 12 mm	kg	100	41.000	4.100.000
13	Upah ikat bibit	ris	350	1.500	525.000
14	Upah tanam bibit di laut	ris	350	3.000	1.050.000
15	Upah pasang rakit di laut	unit	10	100.000	1.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>19.835.000</b>

#### 7. Bantuan Sarana Budidaya Udang Vanname

Kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 sebagai alih kegiatan bagi para nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya, salah satunya adalah sarana budidaya udang vanname. Bantuan budidaya udang Vanname nilainya masing-masing RTP sebesar Rp. 19.420.000 berupa benih udang vanname PL12 sebanyak 200.000 ekor, pakan, probiotik 5 liter dan vitamin C aquatik. Untuk jenis dan jumlah bantuan yang diterima dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Udang Vanname

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Benih Vaname PL 12	Ekor	200.000	45	9.000.000
2	Pakan Starter	Kg	120	17.000	2.040.000
3	Pakan Grower	Kg	280	16.000	4.480.000
4	Pakan Finisher	Kg	220	16.000	3.520.000
5	Probiotik 5 ltr/ jerigen	Jerigen	1	330.000	330.000
6	Vit, C 100 gr/bungkus	bungkus	1	50.000	50.000
<b>Jumlah</b>					<b>19.420.000</b>



## 8. Bantuan Sarana Budidaya Bandeng

Kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 sebagai alih kegiatan bagi para nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya, salah satunya adalah sarana budidaya bandeng. Bantuan budidaya bandeng yang disalurkan sebanyak 18 RTP atau 1,68 persen dari total penerima bantuan, dengan masing-masing RTP mendapatkan bantuan senilai Rp. 20.080.000 berupa benih bandeng ukuran 5-6 cm berjumlah 50.000 ekor benih, pakan 700 kg, probiotik 5 liter dan vitamin C. Pada Tabel 4.10 dapat dilihat rincian jenis dan jumlah bantuan budidaya bandeng yang diterima.

Tabel 4.10. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Bandeng

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Benih Bandeng 5-6 cm	Ekor	50.000	250	12.500.000
2	Pakan Starter	Kg	150	10.000	1.500.000
3	Pakan Grower	Kg	250	10.000	2.500.000
4	Pakan Finisher	Kg	300	10.000	3.000.000
5	Probiotik 5 ltr/jerigen	Jerigen	1	330.000	330.000
6	Vit, C 100 gr/bungkus	bungkus	5	50.000	250.000
<b>Jumlah</b>					<b>20.080.000</b>

## 8. Bantuan Sarana Budidaya Bandeng

Kompensasi penerapan Permen KP 56/2016 sebagai alih kegiatan bagi para nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya, salah satunya adalah sarana budidaya bandeng. Bantuan budidaya bandeng yang disalurkan sebanyak 18 RTP atau 1,68 persen dari total penerima bantuan, dengan masing-masing RTP mendapatkan bantuan senilai Rp. 20.080.000 berupa benih bandeng ukuran 5-6 cm berjumlah 50.000 ekor benih, pakan 700 kg, probiotik 5 liter dan vitamin C. Pada Tabel 4.10 dapat dilihat rincian jenis dan jumlah bantuan budidaya bandeng yang diterima.

Tabel 4.10. Jenis dan Jumlah Bantuan Budidaya Bandeng

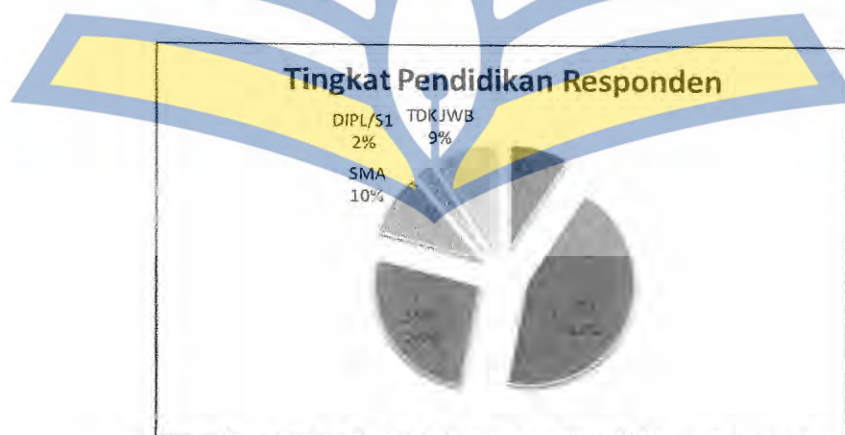
No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Benih Bandeng 5-6 cm	Ekor	50.000	250	12.500.000
2	Pakan Starter	Kg	150	10.000	1.500.000
3	Pakan Grower	Kg	250	10.000	2.500.000
4	Pakan Finisher	Kg	300	10.000	3.000.000
5	Probiotik 5 ltr/jerigen	Jerigen	1	330.000	330.000
6	Vit, C 100 gr/bungkus	bungkus	5	50.000	250.000
<b>Jumlah</b>					<b>20.080.000</b>



## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengumpulan data diperoleh dari data primer di lapangan berupa kuisisioner terhadap sampel nelayan eks penangkap benih lobster, wawancara terhadap penyuluh, observasi di lapangan, dan data sekunder dari instansi terkait. Jumlah responden sebanyak 100 responden untuk mendapatkan informasi lapangan dengan mengisi kuisisioner yang sudah disiapkan sebelumnya.

Tingkat pendidikan responden terdiri dari tidak sekolah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma atau Sarjana (S1). Komposisi responden dilihat dari tingkat pendidikannya sebagai berikut : Tidak Sekolah 9 orang, Sekolah Dasar 44 orang, Sekolah Menengah Pertama 10 orang, Sekolah Menengah Atas 10 orang Diploma atau Sarjana 2 orang, dan yang Tidak Menjawab 9 orang. Tingkat pendidikan Sekolah Dasar pada Gambar 4.2. persentasenya paling besar yaitu sebanyak 44% dari jumlah sampel, selanjutnya SMP 26 persen dan SMA sebanyak 10 persen.



Gambar 4.2. Grafik Tingkat Pendidikan Responden

Penelitian evaluasi bantuan kompensasi terhadap eks penangkap benih lobster diperoleh hasil untuk variabel-variabel yang diteliti sebagai berikut :

### **1. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program kompensasi**

Tingkat keberhasilan kompensasi diindikasikan dengan dua hal yaitu tidak ada atau berkurangnya aktivitas penangkapan benih lobster dibandingkan saat sebelum bantuan kompensasi, dan produktivitas budidaya program kompensasi. Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan kuisioner, observasi di lapangan, dan data sekunder diperoleh dari instansi terkait.

#### **a. Aktivitas penangkapan benih lobster**

Indikator pertama yang menunjukkan keberhasilan program kompensasi penerapan Permen KP No. 56 Tahun 2016 berupa bantuan sarana budidaya bagi nelayan eks penangkap benih lobster adalah tidak adanya atau berkurangnya aktivitas penangkapan benih lobster.

Terbitnya Permen KP nomer 56 tahun 2016 mendapat banyak penentangan dari kalangan nelayan penangkap benih lobster di seluruh nusantara, termasuk di Pulau Lombok. Hal ini terjadi karena besarnya penghasilan yang diperoleh nelayan dari menangkap benih lobster yang dapat dilakukan dengan cara mudah tanpa memerlukan teknologi yang rumit. Dengan diberikannya bantuan sebagai kompensasi bagi nelayan yang terkena dampak penerapan Permen KP tersebut yang berupa sarana budidaya, diharapkan para nelayan yang tadinya mendapat penghasilan dari aktivitas menangkap benih lobster, dapat memperoleh



penghasilan dari aktivitas budidaya sehingga dengan sukarela meninggalkan aktivitas menangkap benih lobster.

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa aktivitas menangkap benih lobster masih dilakukan oleh sebagian nelayan. Hal ini seperti terlihat pada lampiran, bahwa dari 100 orang nelayan yang dijadikan sebagai sampel, yang sejak keluar Permen pelarangan menangkap benih lobster terdapat 79 orang atau 85 persen nelayan yang masih menangkap benih lobster. Namun setelah dilakukan program kompensasi berupa bantuan sarana budidaya, jumlah nelayan yang masih melakukan aktivitas penangkapan benih lobster menurun jumlahnya menjadi 14 orang atau 15 persen nelayan.

Meskipun menghadapi resiko ancaman pidana, hasil kuisisioner menunjukkan 85% nelayan masih melakukan aktivitas penangkapan benih lobster. Hal ini disebabkan karena nelayan masih merasa bahwa aktivitas menangkap benih lobster mudah dilakukan tanpa perlu alat dan teknologi yang mahal dan rumit, serta langsung dapat menghasilkan uang dibandingkan dengan aktivitas melakukan budidaya yang memerlukan modal, butuh ketelatenan, ketrampilan budidaya, serta memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memperoleh hasil panen. Namun dengan adanya program kompensasi berupa bantuan sarana budidaya tersebut, nelayan yang akan mendapat bantuan sarana budidaya diminta kesediaannya dengan sukarela untuk meninggalkan aktivitas menangkap benih lobster, sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sarana budidaya dari pemerintah.



Namun demikian, dari sampel responden nelayan penerima bantuan masih ada nelayan sejumlah 14% yang masih melakukan aktivitas menangkap benih lobster. Nelayan yang masih melakukan aktivitas penangkapan benih lobster ini beralasan karena jika hanya menunggu hasil dari aktivitas budidaya saja memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh hasil sehingga tetap melakukan aktivitas menangkap benih lobster untuk mendapatkan penghasilan. Di samping itu, masih adanya kegiatan pembesaran lobster di sekitar lokasi juga menjadi salah satu penyebab masih adanya nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan benih lobster.

Dari 14 orang yang masih melakukan penangkapan itu 10 orang melakukan penangkapan dengan frekuensi yang menurun, 3 orang melakukan penangkapan dengan frekuensi tetap, dan 1 orang melakukan penangkapan dengan frekuensi yang semakin meningkat. Detil frekuensi aktivitas menangkap benih lobster terdapat pada lampiran 2.



Gambar 4.3: Aktivitas Penangkapan Benih Lobster

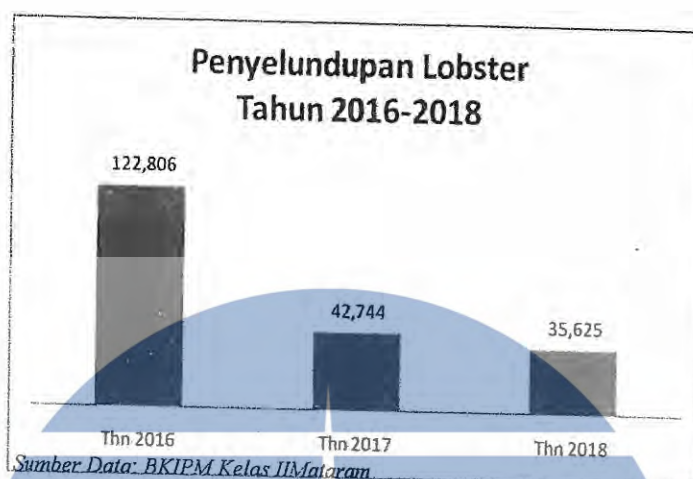
Terjadinya penurunan jumlah nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan benih lobster dimungkinkan karena beberapa sebab di antaranya adalah karena sejak keluarnya Permen KP tentang pelarangan penangkapan benih lobster, nelayan sudah mulai mencari sumber mata pencaharian sampingan. Setelah adanya program kompensasi ini nelayan semakin sibuk dengan tambahan aktivitas budidaya perikanan program kompensasi. Namun karena aktivitas budidaya ini tidak langsung mendapatkan hasil panen melainkan harus menunggu hingga masa panen, mayoritas nelayan memiliki sumber mata pencaharian lain selain sebagai nelayan. Beberapa pekerjaan sampingan yang disebutkan oleh nelayan di antaranya adalah melayani boat wisata, pekebun, berdagang, budidaya ikan, pengepul, dan di antaranya masih menangkap lobster dan ada 3% responden melakukan budidaya pembesaran lobster. Masih adanya aktivitas budidaya pembesaran lobster ini juga menyebabkan aktivitas nelayan menangkap benih lobster tidak bisa dihentikan sama sekali karena kebutuhan internal nelayan untuk keperluan budidaya juga masih ada.

Pengujian statistik untuk variabel penurunan aktivitas penangkapan benih lobster ini dilakukan dengan uji T menggunakan SPSS yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan nyata frekuensi aktivitas penangkapan benih lobster oleh nelayan antara sebelum dan sesudah program kompensasi. Dengan jumlah data sebanyak 100 sampel dan tingkat kepercayaan ditentukan 95% atau  $\alpha$  5%, ditemukan nilai t tabel sebesar 1,984. Hasil pengolahan data



menggunakan SPSS menghasilkan nilai  $t$  12,217 dan nilai sig 0,000 seperti pada lampiran 7 yang artinya adalah terdapat perbedaan signifikan frekuensi aktivitas penangkapan benih lobster oleh nelayan antara sebelum dengan sesudah program kompensasi. Hasil penghitungan rata-rata frekuensi menangkap benih lobster sebelum kompensasi adalah sebesar 14 kali dalam sebulan, dan setelah program kompensasi terjadi penurunan menjadi rata-rata 1 kali dalam sebulan.

Data yang diperoleh dari Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan (BKIPM) Mataram menunjukkan hasil bahwa setelah program kompensasi terjadi penurunan jumlah penyelundupan benih lobster, di mana pada awal pelarangan selama tahun 2016 terjadi penyelundupan sejumlah 122.806 ekor. Selama tahun 2017, penyelundupan berkurang menjadi 42.744 ekor. Dan selama program kompensasi tahun 2018 masih terjadi penyelundupan dengan jumlah menurun menjadi 35.625 ekor. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding saat belum keluarnya Peraturan Menteri tentang pelarangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster. Berdasarkan data Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Mataram, dalam rentang tahun 2014 total benih lobster yang keluar dari NTB tercatat 5,6 juta ekor dengan nilai mencapai Rp 130 miliar. Diduga seluruhnya akan diekspor ke Vietnam.



Gambar 4.4. Grafik Penyelundupan Lobster 2016-2018

Turunnya jumlah upaya penyelundupan benih lobster ini menunjukkan adanya efektivitas penerapan Permen KP tentang pelarangan penangkapan benih lobster yang bertujuan untuk menurunkan jumlah ekspor benih lobster. Yang diharapkan dari diterbitkannya Permen KP No 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan benih lobster adalah agar negara kita tidak mengekspor lobster dalam ukuran benih tetapi diharapkan ekspor ukuran dewasa karena memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan lebih menjamin kelestarian sumber daya alam.

Dengan melihat hasil ini, aktivitas penangkapan benih lobster yang dilakukan oleh nelayan belum berhenti sama sekali, artinya masih ada nelayan yang menangkap benih lobster, tetapi dengan jumlah penangkapan yang menurun secara signifikan. Dari indikator aktivitas penangkapan benih lobster ini dapat dikatakan program pemberian kompensasi berupa bantuan sarana budidaya bagi nelayan eks



penangkap benih lobster telah berhasil karena jumlah penangkapan benih lobster setelah masa program pemberian bantuan kompensasi jumlahnya menurun dibandingkan masa sebelum program bantuan kompensasi.

**b. Produktivitas hasil budidaya program bantuan kompensasi.**

Indikator kedua yang menunjukkan keberhasilan program kompensasi penerapan Permen KP No. 56 Tahun 2016 berupa bantuan sarana budidaya bagi nelayan eks penangkap benih lobster adalah adanya produktivitas hasil budidaya program bantuan kompensasi. Pemberian kompensasi bantuan dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap nelayan eks penangkap benih lobster yang terkena dampak atas penerapan Permen yang berisi tentang pelarangan penangkapan benih lobster. Dengan pemberian bantuan berupa sarana budidaya tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan nelayan yang telah bersedia meninggalkan aktivitas menangkap benih lobster.

Data produktivitas hasil budidaya program kompensasi diperoleh dengan mengumpulkan data primer di lapangan, observasi, serta data sekunder dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur. Data jumlah produksi hasil budidaya (dalam kg) terdapat pada lampiran 3.

### 1) Budidaya ikan kerapu

Budidaya ikan kerapu merupakan jenis budidaya yang menempati jumlah terbesar dari total nelayan dengan semua jenis budidaya yang menjadi sasaran program kompensasi penerapan Permen KP No.56 tahun 2016 bagi nelayan eks penangkap benih lobster. Kompensasi ini berupa bantuan sarana budidaya untuk nelayan eks penangkap benih lobster. Budidaya jenis ikan kerapu ini secara ekonomi memiliki prospek yang bagus karena permintaan pasar yang tinggi. Ada 4 jenis kerapu yang dibudidayakan dalam program bantuan kompensasi ini yaitu kerapu tikus, kerapu cantang, kerapu macan, dan kerapu cantik. Untuk budidaya kerapu, baik itu kerapu tikus, kerapu cantang, kerapu cantik, maupun kerapu macan, pemerintah telah memberikan bantuan modal setiap kelompok berupa 500 ekor benih, pakan dan vitamin, serta sarana berupa jaring dan sarana penangkap ikan.

Budidaya ikan kerapu tikus adalah jenis budidaya dengan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) pembudidaya terbanyak yaitu 450 RTP. Jenis kerapu tikus ini, selain jumlah permintaan yang tinggi, harga jualnya juga bagus hingga kisaran Rp 350.000/kg kondisi hidup. Dari hasil observasi di lapangan, selama proses budidaya ikan kerapu tikus, banyak bibit mati baik pada awal masa tebar maupun selama proses pembesaran. Dari jumlah bibit awal masa tebar sejumlah 500 ekor untuk semua jenis kerapu, kerapu tikus yang bertahan hidup hingga panen hanya kisaran 20-80 ekor



dari jumlah tebar benih 500 ekor, atau angka Kelangsungan Hidup (KH) hanya sekitar 4-16%. Kondisi ini juga terjadi pada budidaya kerapu cantik dengan volume panen sedikit lebih besar dibanding kerapu tikus sekitar 25-100 ekor dari jumlah tebar benih 500 ekor, atau angka Kelangsungan Hidup sebesar 5-20%. Sementara kerapu macan dan kerapu cantang yang harga jualnya tidak semahal kerapu tikus dan kerapu cantik, kelangsungan hidupnya lebih tinggi yaitu berkisar 13-54%.

Gagalnya kegiatan budidaya ikan kerapu yang menempati jumlah terbanyak dalam program kompensasi ini disebabkan oleh banyak faktor. Nelayan menyampaikan banyak permasalahan yang dihadapi yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas hasil budidaya kerapu. Nelayan mengeluhkan banyaknya bibit ikan yang mati, baik dari masa-masa awal pasca tebar hingga sepanjang masa pertumbuhannya. Banyaknya bibit ikan kerapu yang mati pada masa awal tebar diduga penyebabnya karena kualitasnya kurang bagus dan ukurannya terlalu kecil. Ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan yang bersifat kanibal sehingga keseragaman ukuran bibit harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya kanibalisme. Penyebab lain nelayan menduga karena waktu tebar pada siang hari kurang tepat bagi pertumbuhan bibit ikan kerapu karena cuaca dan suhu yang panas. Waktu tebar bibit ikan kerapu ini yang bagus adalah pagi hari atau sore hari karena suhu air sedang tidak panas. Namun

karena kegiatan proyek dengan kondisi harus mengejar waktu jam kerja akhirnya sebagian besar benih ditebar pada waktu siang hari.

Selama masa pertumbuhan ikan kerapu banyak yang mati terserang penyakit. Karena banyaknya ikan yang mati, sebagian besar dari nelayan budidaya kerapu memutuskan untuk memanen ikan pada umur 13 bulan dari umur panen yang semestinya 18 bulan. Hal ini dilakukan oleh nelayan karena khawatir semakin besar kerugian waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk pemeliharaan. Usaha budidaya ikan kerapu memang cukup menjanjikan karena harga jualnya tinggi. Namun dalam proses budidayanya harus diwaspadai datangnya ancaman penyakit *Viral Nervous Necrosis Virus (VNN)* yang banyak menyerang kerapu terutama pada stadia larva dan benih. Ikan yang terserang penyakit ini memiliki gejala berenang memutar (*whirling*), terjadi *sleeping dead* atau ikan berada di dasar seperti mati, serta adanya gejala tingkah laku yang tidak wajar. Solusi dari rentannya ikan kerapu ini adalah dengan peningkatan sistem imunitas ikan (Kamidi, 2014).

Sebagian besar nelayan mengeluhkan kurangnya pendampingan dalam proses budidaya karena sedikitnya jumlah penyuluh yang tersedia. Nelayan juga menyampaikan kebutuhan untuk diberi pelatihan yang intensif agar dapat melakukan penanganan yang tepat dan cepat saat terlihat gejala datangnya penyakit yang dapat menyebabkan kematian ikan kerapu. Nelayan juga mengeluhkan kegiatan program kompensasi ini terlalu



mendadak dengan rentang waktu dari saat sosialisasi hingga waktu pelaksanaan yang sangat singkat.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh nelayan pelaku budidaya kerapu adalah mahalny harga pakan. Pakan ikan yang disubsidi oleh pemerintah tidak dalam jumlah sepenuhnya dari awal hingga panen, namun hanya sebagian saja. Tingginya harga jual kerapu sebenarnya akan dapat menutupi harga pakan yang mahal, tetapi karena kondisi gagal panen menjadi semakin berat bagi nelayan, sehingga harapan nelayan adalah dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dalam melakukan budidaya kerapu ini agar dapat memperoleh hasil yang bagus saat panen.

Selama proses budidaya ikan kerapu, nelayan juga melakukan aktivitas yang lain untuk mendapatkan sumber penghasilan, seperti menjadi pemandu boat wisata, berdagang, menjadi nelayan tangkap, berkebun, dan pekerjaan lainnya. Secara umum nelayan berharap kegiatan pemberian bantuan sarana budidaya ini dapat berkesinambungan dengan pembekalan yang cukup bagi nelayan hingga nelayan memiliki ketrampilan yang cukup dalam melakukan budidaya kerapu secara mandiri.

## 2) Budidaya bawal bintang

Budidaya bawal bintang adalah salah satu jenis budidaya dalam program kompensasi penerapan Permen KP No.56 tahun 2016 bagi nelayan eks penangkap benih lobster. Kompensasi ini berupa

bantuan sarana budidaya berupa benih dengan ukuran 5-6 cm berjumlah 620 ekor, pakan starter sebanyak 80 kg, pakan grower 120 kg, pakan finisher 200 kg, vitamin C 5 bungkus, termasuk pemberat jaring, tali PE 7 mm, jaring kasar, jaring halus dan jaring penutup dengan jumlah total bantuan untuk masing-masing pembudidaya bawal bintang sebesar Rp. 20.330.000 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Budidaya bawal bintang dilakukan nelayan dengan jumlah pembudidaya sejumlah 205 RTP atau 19% dari total pembudidaya program kompensasi, menempati jumlah terbanyak kedua setelah budidaya kerapu. Proses budidaya ikan bawal bintang ini relatif lebih mudah dilakukan oleh nelayan dengan pembekalan teknik budidaya yang tidak terlalu sulit bagi nelayan. Hal ini karena faktor dari sifat ikan bawal bintang yang lebih tahan terhadap serangan penyakit dibandingkan dengan ikan kerapu. Waktu untuk budidaya dari masa tebar benih hingga panen juga relatif lebih singkat dibanding ikan kerapu, yaitu hanya 6-7 bulan.

Proses budidaya ikan bawal bintang menghasilkan tingkat produktivitas yang relatif bagus dengan jumlah panen yang tinggi. Nelayan dapat memanen ikan bawal bintang dengan berat rata-rata 275 kg. Jumlah ikan yang hidup hingga panen atau disebut sebagai kelangsungan hidup ikan bawal ini relatif tinggi yaitu sebesar 70-80%. Tetapi dari aspek ekonomi dirasa oleh nelayan masih belum begitu menguntungkan karena serapan pasar yang kurang bagus. Hal



lain yang juga dikeluhkan oleh nelayan adalah harga pakan yang dirasakan mahal bagi nelayan. Persoalan penting pada budidaya bawal bintang adalah daya serap pasar rendah dan harga jual yang tidak bagus. Melakukan budidaya bawal bintang relatif lebih mudah karena tidak rentan terkena penyakit seperti pada budidaya kerapu. Dalam hal ini yang dibutuhkan oleh nelayan adalah pendampingan hingga pemasaran agar nelayan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Selama melakukan budidaya bawal bintang, nelayan dapat sambil melakukan aktivitas mencari sumber penghasilan lain antara lain menangkap ikan, berdagang, menjadi pemandu boat wisata, berkebun, serta pekerjaan serabutan yang lain. Secara umum nelayan merasa terbantu dan berharap program kegiatan bantuan sarana budidaya masih dapat berkesinambungan untuk membantu nelayan dalam penyediaan modal sarana budidaya sebagai akibat terhentinya pemasukan dari menangkap benih lobster yang sudah dilarang oleh pemerintah.

### 3) Budidaya rumput laut

Budidaya rumput laut adalah salah satu jenis budidaya dalam program kompensasi penerapan Permen KP No.56 tahun 2016 bagi nelayan eks penangkap benih lobster yang menempati porsi besar urutan ketiga. Jumlah yang menerima bantuan untuk budidaya rumput laut berjumlah 207 RTP atau 19,27 persen dari total penerima bantuan. Bantuan budidaya rumput laut bagi para

penangkap eks benih lobster terdiri dari 2 jenis menurut metode budidayanya, yaitu budidaya rumput laut *cottoni* dengan metode *longline* dan dengan rakit. Masing-masing mendapat bantuan berupa bibit rumput laut dan sarana budidaya.

Dari aspek budidaya untuk kedua sistem ini dapat disebut berhasil adalah berhasil dengan berat panen minimal 4 kali lipat berat bibit. Hasil panen rumput laut yang diperoleh nelayan seberat 2500 kg rumput laut basah, dan ada yang menimbang kondisi kering seberat 400 kg. Nelayan dapat melakukan panen sesuai umur rumput laut yaitu 1,5 bulan. Selama melakukan budidaya rumput laut, nelayan dapat sambil melakukan aktivitas mencari sumber penghasilan lain antara lain menangkap ikan, berdagang, menjadi pemandu boat wisata, berkebun, serta pekerjaan serabutan yang lain. Dari hasil wawancara dengan responden, kendala yang dihadapi nelayan dalam budidaya rumput laut adalah munculnya banyak lumut saat musim kemarau, penyakit ice-ice, dan bibit terbawa gelombang. Kendala yang lain adalah jika panen saat musim hujan, nelayan kesulitan untuk mengeringkan karena mereka masih mengeringkan dengan metode tradisional yaitu menjemur di bawah sinar matahari. Nelayan mengharapkan sarana rakit bambu yang rusak termakan waktu dan tali-tali yang hilang terbawa ombak laut bisa mendapat bantuan secara rutin sehingga dapat membantu nelayan untuk mengurangi modal usaha yang dikeluarkan. Secara



umum nelayan merasa terbantu dengan adanya program kompensasi berupa bantuan sarana budidaya.

#### 4) Budidaya ikan lele

Budidaya ikan lele dengan jumlah 30 RTP menjadi salah satu jenis budidaya yang menjadi sasaran program kompensasi penerapan Permen KP bagi nelayan eks penangkap benih lobster. Pelaku budidaya ikan lele ini menempati jumlah 2,79 persen dari total penerima bantuan kompensasi. Bantuan budidaya ikan lele yang diterima oleh pembudidaya ikan lele senilai Rp. 19.866.500,00 berupa benih ikan lele ukuran 6-7 cm sebanyak 8.000 ekor, pakan, probiotik, dan sarana budiaya lainnya. Budidaya ikan lele yang dilakukan dengan sistem bioflok yaitu budidaya di lahan atau kolam terbatas dengan tingkat kepadatan yang tinggi dengan memanfaatkan mikroorganisme sebagai sumber pakan.

Dalam proses budidaya yang dilakukan, nelayan pelaku budidaya ikan lele tidak banyak menjumpai kendala. Waktu yang diperlukan oleh nelayan dalam budidaya ikan lele ini dalam sekali panen adalah 4 bulan dari mulai awal tebar benih. Nelayan dapat hasil panen lele seberat rata-rata 750 kg. Selama melakukan budidaya ikan lele, nelayan dapat sambil melakukan aktivitas mencari sumber penghasilan lain antara lain menangkap ikan, berdagang, menjadi pemandu boat wisata, berkebun, serta pekerjaan serabutan yang lain. Dari hasil panen budidaya ikan lele nelayan merasa cukup terbantu dengan adanya program bantuan kompensasi,

dan masih memiliki waktu untuk melakukan aktivitas lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan berharap akan tetap ada program bantuan dari pemerintah dalam kegiatan budidaya ikan lele yang mereka lakukan.

#### 5) Budidaya ikan nila

Budidaya ikan nila adalah salah satu jenis budidaya dalam program kompensasi penerapan Permen KP bagi para nelayan eks penangkap benih lobster. Nelayan pembudidaya ikan nila dalam kegiatan ini berjumlah 14 RTP atau 1,30 persen dari jumlah keseluruhan penerima bantuan kompensasi. Bantuan budidaya ikan nila sama dengan bantuan budidaya lainnya yaitu menerima sejumlah sarana budidaya perikanan berupa benih, pakan dan probiotik. Bantuan yang diterima senilai Rp. 19.240.000,00.

Dalam proses budidaya ikan nila, nelayan dapat melakukan panen dalam rentang waktu 6 bulan dari masa awal tebar benih, dengan jumlah panen seberat sekitar 700 kg. Selama proses budidaya ikan nila ini nelayan tidak mendapat banyak kendala, serta dapat melakukan panen dengan hasil yang cukup berhasil. Selama proses budidaya ikan nila, nelayan dapat sambil melakukan aktivitas lain untuk mendapatkan sumber penghasilan lain. Kendala yang dihadapi dalam budidaya ikan nila adalah terbatasnya sumber air tawar. Hasil panen untuk jenis budidaya yang porsinya kecil ini termasuk berhasil dengan jumlah produktivitas yang bagus. Harapan pelaku budidaya ikan nila mengharapkan adanya program bantuan



dari pemerintah berupa penyediaan sarana sumber air bersih untuk mendukung kelancaran budidaya ikan nila yang mereka lakukan.

#### 6) Budidaya ikan bandeng

Budidaya ikan bandeng merupakan salah satu jenis budidaya dalam program kompensasi penerapan Permen KP pelarangan penangkapan benih lobster. Kompensasi bagi eks penangkap benih lobster ini diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB kepada sebanyak 18 RTP atau 1,68 persen dari total penerima bantuan, dengan masing-masing RTP mendapatkan bantuan senilai Rp. 20.080.000 berupa benih bandeng, pakan, dan vitamin C untuk pertumbuhan ikan bandeng.

Dalam proses budidaya ikan bandeng, nelayan tidak banyak menemui kendala yang berarti, dan nelayan dapat melakukan panen dalam rentang waktu 4 bulan sejak masa tebar benih. Jumlah panen yang diperoleh nelayan kisaran 800 kg dengan hasil yang memuaskan. Selama proses budidaya ikan bandeng, nelayan dapat sambil melakukan aktivitas lain untuk mendapatkan sumber penghasilan lain selain dari usaha budidaya ikan bandeng. Nelayan pembudidaya ikan bandeng merasa terbantu dengan adanya program bantuan kompensasi dan berharap berkesinambungan.

#### 7) Budidaya udang vanname

Budidaya udang vanname merupakan salah satu jenis budidaya dalam program kompensasi penerapan Permen KP bagi nelayan eks penangkap benih lobster. Jumlah pembudidaya udang

vanname penerima bantuan ini sebanyak 20 RTP atau sebesar 1,86% dari total jumlah pembudidaya penerima bantuan.

Dalam proses budidaya udang vanname, kendala yang dihadapi oleh nelayan adalah terbatasnya sumber air bersih. Hasil dari budidaya udang vanname ini berhasil meski ada kendala tersebut, nelayan dapat memperoleh hasil panen setelah masa budidaya selama 4 bulan sejak masa tebar benih. Jumlah udang yang dipanen nelayan sejumlah beratnya sekitar 500 kg. Nelayan merasa terbantu dengan adanya program kompensasi dari pemerintah dan mengharapkan untuk program berikutnya dapat diberikan bantuan berupa sarana kincir air dan sarana untuk penyediaan air bersih.

Dari hasil observasi di lapangan dan analisis data kuisioner, dapat diidentifikasi bahwa dari aspek budidaya, program kompensasi penerapan Permen KPNo 56 Tahun 2016 berupa pemberian bantuan sarana budidaya, untuk budidaya ikan kerapu yang berjumlah 42% meskipun memiliki prospek bagus tetapi belum berhasil karena kendala teknik budidaya yang belum dikuasai oleh nelayan. Adapun untuk budidaya selain ikan kerapu memiliki keberhasilan jumlah panen tinggi. Akan tetapi untuk keberhasilan budidaya bawal bintang, nelayan perlu mendapatkan pendampingan sampai tahap pemasaran sehingga mendapatkan harga yang bagus serta serapan pasar yang tinggi. Jika dilihat dari prospek secara ekonomi, budidaya kerapu memiliki prospek yang bagus karena harga jual yang sangat tinggi. Akan tetapi dalam proses budidaya diperlukan pendampingan



dan pelatihan bagi nelayan secara lebih intensif sehingga dapat meminimalisir kegagalan dalam melakukan budidaya kerapu.

Evaluasi secara umum, nelayan merasa terbantu dengan adanya program bantuan kompensasi ini meskipun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan khususnya untuk budidaya ikan kerapu. Nelayan berharap bantuan semacam ini akan tetap berlanjut dan dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Pendampingan dan pelatihan diharapkan lebih intensif lagi terkait dengan penyakit ikan yang terjadi pada budidaya kerapu karena mengakibatkan kerugian gagal panen. Nelayan berharap peralatan-peralatan yang sudah tidak layak agar dapat diganti dengan yang baru, misalnya bambu, drum foam, dan lain-lain. Nelayan pembudidaya udang vanname berharap mendapat bantuan alat kincir yang dapat menunjang keberhasilan budidaya.

### c. Aspek Ekonomi Sosial Nelayan

Evaluasi program bantuan kompensasi pelaksanaan Permen KP No.56 Tahun 2016 bagi nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya salah satunya adalah dari aspek ekonomi sosial nelayan. Penilaian dampak program bantuan kompensasi terhadap aspek ekonomi dan sosial nelayan eks penangkap benih lobster dapat dilihat dengan 2 variabel sebagai berikut :

#### 1) Aspek ekonomi

Aspek ekonomi nelayan dinilai dengan indikator berupa pendapatan nelayan yang dibandingkan antara masa terbit dan

berlakunya Permen KP No.56 Tahun 2016 tanpa kompensasi, dan setelah berjalannya program kompensasi bantuan sarana budidaya.

Pelaksanaan Permen KP No.56 Tahun 2016 yang berisi tentang pelarangan menangkap dan mengeluarkan benih lobster ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm atau berat kurang dari 200 gram telah memberikan dampak secara ekonomi terhadap nelayan eks penangkap lobster. Hal ini karena selama ini aktivitas menangkap benih lobster telah memberikan penghasilan yang tinggi karena mahalnya harga jual benih lobster. Dengan keluarnya peraturan menteri tentang pelarangan menangkap benih lobster telah menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan eks penangkap benih lobster. Untuk menanggulangi dampak ini, pemerintah mengeluarkan program bantuan sarana budidaya untuk alih usaha bagi nelayan eks penangkap benih lobster dari yang sebelumnya menangkap benih lobster ke usaha budidaya perikanan. Evaluasi dampak program kompensasi ini dari aspek ekonomi dinilai dari jumlah penghasilan nelayan yang dibandingkan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya program bantuan sarana budidaya.

Berdasarkan analisis data hasil kuisioner, data berupa penghasilan nelayan dilakukan uji beda nyata dengan tingkat signifikansi 5% menggunakan program SPSS untuk melihat apakah ada perbedaan nyata antara penghasilan nelayan sebelum program kompensasi dengan setelah program kompensasi. Hasil t-Tes pada lampiran 7 menunjukkan hasil nilai t 2,671 dan nilai sig 0,009 atau



lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan 5% seperti pada lampiran 7. Hasil ini artinya adalah terdapat perbedaan signifikan penghasilan nelayan antara sebelum dengan sesudah program kompensasi.

Hasil penghitungan rata-rata penghasilan nelayan sebelum program kompensasi sebesar Rp 6.218.520,- dan setelah program kompensasi terjadi penurunan rata-ratanya menjadi Rp 4.486.000,- atau terjadi penurunan rata-rata sebesar Rp 1.732.520,-. Sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya program pemberian bantuan sarana budidaya ini yaitu sebagai kompensasi atas hilangnya penghasilan nelayan dari menjual benih lobster, dengan adanya kegiatan budidaya diharapkan nelayan akan memperoleh penghasilan sebagai pengganti setelah meninggalkan aktivitas menangkap benih lobster. Dari analisis ini justru diperoleh hasil bahwa penghasilan nelayan turun secara signifikan setelah diadakannya program budidaya dengan bantuan sarana dari pemerintah. Dari 100 responden, 46 orang di antaranya mengisi kuisioner penghasilan yang menurun setelah dilaksanakannya program kompensasi. Nelayan yang penghasilannya menurun setelah dilaksanakannya program kompensasi bantuan sarana budidaya ini didominasi oleh nelayan yang penghasilannya sampingannya adalah menangkap ikan. Meskipun sudah diberi bantuan berupa sarana budidaya, kultur nelayan yang selama ini melakukan aktivitas menangkap ikan dengan hasil yang langsung dapat dijual ataupun

dikonsumsi, perlu waktu untuk dirubah menjadi aktivitas budidaya yang butuh waktu serta ketelatenan dalam aktivitas budidaya sebelum dapat memanen hasilnya.

Terjadinya penurunan penghasilan nelayan setelah dilaksanakannya program kompensasi ini terjadi dimungkinkan karena saat awal program kompensasi dilaksanakan, nelayan sudah tidak mendapatkan penghasilan dari menangkap benih lobster karena telah diminta komitmennya untuk meninggalkan aktivitas menangkap benih lobster. Pada saat awal menjelang dilaksanakannya program pemberian bantuan sarana budidaya ini, nelayan telah berikrar dan berkomitmen tidak akan menangkap benih lobster lagi. Bahkan, secara simbolis nelayan telah mengangkat dari laut dan membakar “poongan” yang dijadikan alat penangkap benih lobster.

Hal ini didukung juga dengan hasil analisis data untuk indikator berkurangnya aktivitas menangkap benih lobster setelah program kompensasi yaitu terjadi penurunan secara signifikan. Artinya bahwa penghasilan dari hasil kegiatan budidaya belum dapat menyamai ataupun bahkan melebihi penghasilan dari hasil menangkap benih lobster.

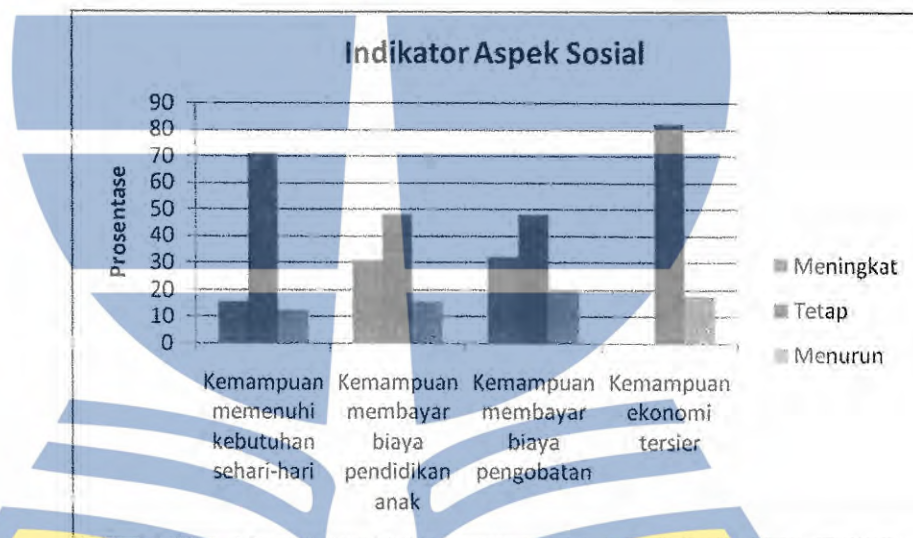


## 2) Aspek sosial

Evaluasi program bantuan kompensasi pelaksanaan Permen KP No.56 Tahun 2016 bagi nelayan eks penangkap benih lobster berupa bantuan sarana budidaya salah satunya adalah dari aspek sosial. Penilaian aspek sosial nelayan dilakukan dengan melihat beberapa indikator yaitu berupa kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk keluarganya, serta kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder.

Data yang diperoleh dari hasil kuisioner, pada indikator kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 71% responden menjawab tidak ada perubahan kondisi, yaitu masa sebelum dan setelah program kompensasi tetap mampu. Sedangkan 16% responden menjawab meningkat, dan sisanya 13% responden menjawab menurun. Pada indikator kemampuan membayar biaya pendidikan bagi anak-anaknya, 48% responden menjawab tetap mampu, 31% responden menjawab kemampuannya meningkat, 16% responden menjawab kemampuannya menurun, dan 5% tidak menjawab karena tidak memiliki tanggungan anak usia sekolah. Pada indikator mampu membayar biaya berobat, 48% responden menjawab tetap mampu, 32% responden menjawab kemampuannya meningkat, dan 20% responden menjawab kemampuannya menurun untuk membayar biaya berobat. Untuk fasilitas kesehatan yang dipilih untuk tempat berobat, 82% responden menjawab tetap ke

puskesmas, baik itu pada masa sebelum maupun setelah program kompensasi. Untuk indikator kemampuan ekonomi tersier berupa kepemilikan tabungan, 35% responden menjawab tetap memiliki tabungan, 47% responden menjawab tetap tidak memiliki tabungan baik itu pada masa sebelum maupun sesudah kompensasi, dan sisanya 18% responden menjawab memiliki tabungan pada masa sebelum program kompensasi dan tidak memiliki tabungan pada masa setelah kompensasi. Indikator-indikator aspek sosial terangkum dalam gambar 4.5.



Gambar 4.5. Grafik kondisi kemampuan dalam aspek sosial

Hasil survey terhadap responden menunjukkan mayoritas nelayan dalam kondisi tetap dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan aspek sosial. Hal ini disebabkan karena sejak diberlakukannya Permen KP tentang pelarangan penangkapan benih lobster, nelayan telah mulai melakukan aktivitas lain yang menjadi sumber penghasilannya. Dari hasil kuisisioner menunjukkan beberapa aktivitas yang dilakukan nelayan selain



melakukan budidaya bantuan kompensasi untuk menjadi sumber penghasilan setelah diberlakukannya Permen KP 56/2016 antara lain sebagai pemandu boat wisata, pekebun, berdagang, dan menjadi pengepul hasil perikanan.



## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Budidaya yang memiliki prospek secara ekonomi adalah budidaya kerapu karena memiliki nilai jual yang tinggi namun dalam pelaksanaannya kurang berhasil sehingga perlu dilakukan pendampingan agar dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan ekonomi nelayan. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan budidaya program kompensasi sudah berjalan dan dalam pelaksanaannya cukup berhasil namun masih ada aktivitas nelayan dalam menangkap benih lobster walau dengan jumlah pelaku dan frekuensi yang menurun secara signifikan hal ini ditunjukkan dengan data penangkapan benih lobster hasil kuisisioner dan data penyelundupan benih lobster dari BKIPM Mataram menunjukkan penurunan jumlah selama pelaksanaan program kompensasi dibanding masa sebelum kompensasi.
2. Dampak program bantuan kompensasi terhadap nelayan eks penangkap benih lobster secara ekonomi, penghasilan nelayan mengalami penurunan dibanding sebelum program kompensasi. Indikator aspek sosial nelayan berupa kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder, tidak mengalami perubahan kemampuan dari masa sebelum dan sesudah program kompensasi karena nelayan memiliki aktivitas lain yang menjadi sumber penghasilan mereka.



## B. Saran

Untuk mencapai keberhasilan program kompensasi sejenis, ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Pendampingan lebih ditingkatkan baik oleh Penyuluh maupun Dinas Kabupaten Lombok Timur, pendampingan sejak sebelum penerimaan bantuan kompensasi, saat pelaksanaan budidaya hingga pemasaran hasil budidaya perikanan sehingga masyarakat benar-benar siap dalam melaksanakan program tersebut.
2. Perlu diadakan pelatihan intensif sesuai dengan jenis bantuan yang diterima untuk mendukung tingkat keberhasilan sehingga mengurangi kesalahan teknis budidaya yang berpengaruh terhadap hasil budidaya.
3. Menumbuhkan motivasi berwirausaha, karena usaha budidaya lebih membutuhkan ketelitian dan ketrampilan, dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memetik hasil dibandingkan dengan usaha penangkapan ikan yang sudah biasa dilakukan oleh nelayan.
4. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Provinsi dalam pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Damora, 2015 , [http://www.wwf.or.id/berita\\_fakta/?37942/apakah-lobster-akan-punah](http://www.wwf.or.id/berita_fakta/?37942/apakah-lobster-akan-punah)
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeth. Bandung
- Amrin, Ismadi. 2017, <https://maritimeneews.id/implementasi-permen-kp-562016-selamatkan-sumber-daya-lobster/>
- Anonim.2015.<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/view/1075> (jurnal kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan) Vol. 5 No. 1 tahun 2015
- Anonim. 2017 . <https://kumparan.com/edy-sofyan/penyelundupan-benih-lobster-keluar-indonesia-semakin-marak>
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono.2002. Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi. hal. 140-141. Universitas Diponegoro. Semarang
- DJPB-KKP. Petunjuk Praktis Mengelola PascaPanen Rumput Laut. Diambil 28 Nopember 2018, dari situs World Wide Web: [http://djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/265/PETUNJUK-PRAKTIS-MENGELOLA-PASCA-PANEN-RUMPUT-LAUT/?category\\_id=13](http://djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/265/PETUNJUK-PRAKTIS-MENGELOLA-PASCA-PANEN-RUMPUT-LAUT/?category_id=13)
- DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB). 2015. Kajian/Analisis Pengelolaan Benih Lobster (*Panulirus, sp*) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram
- Dunn, N.William. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Hal 429. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Erlania, Radiarta, I.N., Sugama, K., 2014. Dinamika Kelimpahan Benih Lobster (*Panulirus spp.*) di Perairan Teluk Gerupuk, Nusa Tenggara Barat : Tantangan Pengembangan Teknologi Budidaya Lobster. Jurnal Riset Akuakultur Vol. 9 No. 3 Tahun 2014 : 475-486.
- Erlania, Radiarta I.N., Haryadi, J., 2016. Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya : Studi Kasus Perairan Pulau Lombok. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Volume 8 Nomor 2 Nopember 2016. P-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2505-6550
- Erlania, I Nyoman Radiarta, Joni Haryadi, 2016. Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster Untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Volume 8 Nomor 2 Nopember 2016 : 85-96



- Faisal, S. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fauzi, Imron. 2013. *Karapas*. <http://caves.or.id/arsip/glossary/karapas>
- Furqan. 2017. *Kebijakan Pelarangan Penangkapan Lobster Panulirus spp. dan Implikasinya terhadap Perikanan Lobster di Palabuhan Ratu*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hafil, Muhammad. 2017. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/12/oszdqg430-kkp-siap-kucurkan-bantuan-untuk-nelayan-lombok>
- Hasrun, 1996. *Kajian Beberapa Parameter Populasi Udang Karang (Panulirus Homarus L) Berdasarkan Hasil Tangkapan Jaring Insang Dasar di Perairan Pangandaran Jawa Barat*. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Isnansetyo, A., Yuspanani. 1993. *Biologi dan Kemungkinan Budidaya Udang Barong (Panulirus sp.)*. Buletin Budidaya Laut, Lampung. 7 : 35 - 43
- Junaidi, M., Cokrowati, N., Abidin, Z., 2010. *Aspek Reproduksi Lobster (Panulirus sp.) di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok*. Jurnal Kelautan, Volume 3, No.1, April 2010 ISSN : 1907-9931
- Kamidi, Sry Retno Pratiwi. 2014. *Efektivitas Jintan Hitam (Nigella sativa) pada Peningkatan Sistem Imun Non Spesifik Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) terhadap Viral Nervous Necrosis (VNN)*, [digilab.unila.ac.id](http://digilab.unila.ac.id)
- Kordi, G. 2001. *Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Tambak*. Kanisius. Yogyakarta
- Muljanah I, Setiabudi E, Suryaningrum D, Wibowo S. 1994. *Pemanfaatan Sumberdaya Lobster di Kawasan Jawa dan Bali*. Jurnal Penelitian Pasca Panen Perikanan. No. 79 Tahun 1994. Hal. 23. Jakarta.
- Nazir, Moh., 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Nontji A. 1993. *Laut Nusantara*. Jakarta : Djambatan
- Priyambodo, B. & Sarifin. 2008. *Lobster Aquaculture Industry in Eastern Indonesia, Present Status and Prospects (p. 36-45)*. In William, K.C. *Spiny Lobster aquaculture in the Asia-Pacific region. Proceedings of an International Symposium, NhaTrang, Vietnam, 9-10 December 2008*.
- Rianta Pratiwi, 2013. *Lobster Komersial (Panulirus spp.)*. Oseana, Volume XXXVIII, Nomor 2, Tahun 2013 : 55-68. ISSN 0216-1877.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Lampiran 1. Kuisisioner

No. Responden : \_\_\_\_

**KUESIONER PENELITIAN**

**KAJIAN DAMPAK KOMPENSASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56 TAHUN 2016 TERHADAP  
ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL NELAYAN EKS PENANGKAP BENIH  
LOBSTER DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NUSA TENGGARA BARAT**

**A. Identitas Responden**

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Alamat : Dusun/Desa .....
- Kecamatan .....
4. Jumlah tanggungan : .....
5. Kepemilikan Rumah (Berilah tanda contreng  $\surd$  pada kotak) :
  - Milik Sendiri       Sewa       Menumpang
6. Pendidikan (Berilah tanda contreng  $\surd$  pada kotak) :
  - Tidak Sekolah       SMP/Sederajat
  - SD/Sederajat       SMA/Sederajat       Diploma/Sarjana/S2

**B. Aktivitas Menangkap Benih Lobster dan Pendapatan Nelayan (Aspek Ekonomi)**

		Setelah Permen KP 56/2016	
		Sebelum Kompensasi	Setelah Kompensasi
1.	Frekuensi aktivitas menangkap benih lobster (berapa kali dalam sebulan)		
2.	Sumber mata pencaharian utama		
3.	Jumlah penghasilan dari mata pencaharian utama per bulan		
4.	Sumber mata		



	pencapaian sampingan		
5.	Jumlah penghasilan dari mata pencarian sampingan per bulan		
6.	Jumlah pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan pokok harian, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dll)		

### C. Keberhasilan Program Bantuan Kompensasi

#### 1) Produktivitas hasil budidaya

- a. Jenis budidaya bantuan : .....
- b. Nilai bantuan : Rp.....
- c. Bentuk bantuan : .....
- d. Jumlah anggota kelompok : ..... orang
- e. Jangka waktu berjalannya aktivitas budidaya : ..... bulan (sejak.....)
- f. Frekuensi panen sejak usaha budidaya : ..... kali
- g. Jangka waktu sekali panen : ..... bulan
- h. Jumlah modal yang dikeluarkan satu kelompok setiap periode usaha (sekali panen) : Rp..... (per orang : Rp.....)
- i. Jumlah hasil produksi setiap kali panen : ..... kg
- j. Harga jual setiap panen : Rp....
- k. Keuntungan bersih hasil budidaya per orang setiap panen : Rp....

#### 2) Aktivitas budidaya program bantuan kompensasi

Beri tanda  $\checkmark$  pada kolom sesuai pendapat Anda (SS=Sangat Setuju, S=Setuju, R=Ragu-ragu, TS=Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju)

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Nelayan memiliki ketrampilan dalam aktivitas budidaya					
2.	Jenis budidaya bantuan sesuai dengan keahlian yang dimiliki nelayan					
3.	Bantuan sarana budidaya mencukupi jumlahnya					
4.	Bantuan sarana sesuai dengan budidaya yang dilakukan					
5.	Pendampingan dan penyuluhan yang diterima nelayan memadai untuk keberhasilan budidaya					
6.	Pemasaran hasil budidaya mudah dilakukan					

**D. Kondisi Sosial Nelayan**  
**a. Kemampuan nelayan dalam mengakses pendidikan bagi keluarganya**

1. Jumlah anak usia sekolah

Jenjang usia	TK/PAUD	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
Jumlah					

2. Kemampuan mengakses pendidikan, beri tanda  pada kolom sesuai kondisi Anda

No.	A. Sebelum Permen KP 56/2016		B. Setelah Permen KP 56/2016 Sebelum Kompensasi (Acuan : A)		C. Setelah Permen KP 56/2016 Setelah Kompensasi (Acuan : B)			
	Mampu	Tidak Mampu	Meningkat	Tetap	Menurun	Meningkat	Tetap	Menurun
1.								
2.								

**b. Kemampuan nelayan dalam mengakses pelayanan kesehatan bagi keluarganya**

1. Anggota keluarga yang memiliki keanggotaan BPJS sejumlah.....orang (dari total anggota keluarga sejumlah ....orang)
2. Kemampuan mengakses kesehatan, beri tanda  pada kolom sesuai kondisi Anda

No.	A. Sebelum Permen KP 56/2016		B. Setelah Permen KP 56/2016 Sebelum Kompensasi(Acuan : A)		C. Setelah Permen KP 56/2016 Setelah Kompensasi (Acuan: B)			
	Mampu	Tidak Mampu	Meningkat	Tetap	Menurun	Meningkat	Tetap	Menurun
1.								
2.								



	Sebelum Permen KP 56/2016	Setelah Permen KP 56/2016 Sebelum Kompensasi	Setelah Permen KP 56/2016 Setelah Kompensasi
	Tempat melakukan pengobatan saat anggota keluarga sakit		
<b>c. Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier</b>			
	Sebelum Permen KP 56/2016	Setelah Permen KP 56/2016 Sebelum Kompensasi	Setelah Permen KP 56/2016 Setelah Kompensasi
1.	Kepemilikan tabungan		
2.	Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier (contoh: rekreasi, hiburan, dll)		
3.	Kemampuan membeli dan memiliki aset kekayaan (tanah, rumah tambahan, dll)		
4.	Tindakan yang dilakukan jika kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi		





## Lampiran 2. Frekuensi Menangkap Benih Lobster per Bulan

No	Frekuensi		No	Frekuensi		No	Frekuensi	
	Sebelum	Sesudah		Sesudah	Sebelum		Sebelum	Sesudah
1	15	0	41	13	0	81	20	0
2	10	0	42	13	0	82	20	0
3	12	0	43	14	0	83	24	4
4	0	0	44	15	0	84	7	0
5	0	0	45	15	0	85	10	0
6	0	0	46	16	0	86	0	0
7	0	0	47	13	0	87	5	0
8	0	0	48	0	0	88	0	0
9	0	0	49	20	0	89	15	0
10	30	5	50	20	26	90	15	0
11	30	5	51	30	30	91	10	0
12	30	0	52	20	20	92	15	0
13	30	30	53	30	0	93	20	0
14	30	0	54	30	0	94	14	0
15	30	0	55	30	0	95	8	0
16	10	0	56	0	0	96	0	0
17	5	0	57	20	0	97	0	0
18	7	2	58	0	0	98	15	0
19	0	0	59	30	0	99	18	0
20	5	0	60	15	0	100	14	0
21	7	0	61	0	0			
22	0	0	62	0	0			
23	7	0	63	30	5			
24	6	0	64	30	0			
25	10	3	65	30	4			
26	6	0	66	30	0			
27	15	0	67	30	0			
28	8	2	68	30	8			
29	12	0	69	30	0			
30	13	0	70	30	4			
31	13	0	71	25	0			
32	13	0	72	30	0			
33	13	0	73	0	0			
34	13	0	74	0	0			
35	14	0	75	5	0			
36	13	0	76	5	0			
37	12	0	77	20	0			
38	12	0	78	20	0			
39	14	0	79	0	0			
40	12	0	80	0	0			

## Lampiran 3. Hasil Produksi Budidaya

Budidaya	Periode panen (bln)	Jumlah (kg)	Harga/kg	Produksi
	13	16	350,000	5,600,000
	13	20	350,000	7,000,000
	13	15	350,000	5,250,000
	13	15	350,000	5,250,000
	13	30	350,000	10,500,000
	13	60	350,000	21,000,000
	13	80	350,000	28,000,000
	13	50	350,000	17,500,000
	13	50	350,000	17,500,000
	13	83	350,000	29,050,000
	13	35	350,000	12,250,000
	13	50	350,000	17,500,000
	13	25	300,000	7,500,000
	13	30	350,000	10,500,000
	13	25	350,000	8,750,000
	12	20	350,000	7,000,000
a. Kerapu tikus	13	30	350,000	10,500,000
	13	40	350,000	14,000,000
	18	52	350,000	18,200,000
	18	37	350,000	12,950,000
	18	47	350,000	16,450,000
	18	42	350,000	14,700,000
	18	36	350,000	12,600,000
	18	40	350,000	14,000,000
	18	45	350,000	15,750,000
	18	39	357,000	13,650,000
	18	42	350,000	14,700,000
	18	35	350,000	12,250,000
	18	51	350,000	17,850,000
	18	33	350,000	11,550,000
	18	35	350,000	12,250,000
	18	40	350,000	14,000,000
	18	34	350,000	11,900,000



	18	45	350,000	15,750,000
	18	33	350,000	11,550,000
	18	54	350,000	18,900,000
	18	46	350,000	16,100,000
	18	60	350,000	21,000,000
	18	38	350,000	13,300,000
	18	41	350,000	14,350,000
	18	38	350,000	13,300,000
	18	43	350,000	15,050,000
	7	265	50,000	13,250,000
	7	256	50,000	12,800,000
	7	282	50,000	14,100,000
	7	278	50,000	13,900,000
	7	277	50,000	13,850,000
	7	275	50,000	13,750,000
	7	287	50,000	14,350,000
	7	277	50,000	14,350,000
	7	285	50,000	14,250,000
b. Bawal Bintang	7	280	50,000	14,000,000
	7	283	50,000	14,150,000
	7	285	50,000	14,250,000
	7	289	50,000	14,450,000
	7	292	50,000	14,600,000
	7	287	50,000	14,350,000
	7	288	50,000	14,400,000
	7	291	50,000	14,550,000
	7	295	50,000	14,750,000
	7	287	50,000	14,350,000
	1.5	400	15,000	6,000,000
	1.5	400	15,000	6,000,000
	1.5	410	15,000	6,150,000
c. rl cottoni rakit	1.5	400	15,000	6,000,000
	1.5	400	15,000	6,000,000
	1.5	450	15,000	6,750,000
	1.5	400	15,000	6,000,000
	1.5	450	15,000	6,750,000

	1.5	400	15,000	6,000,000
	1.5	400	15,000	6,000,000
	1.5	350	15,000	5,250,000
	1.5	350	15,000	5,250,000
	2	450	15,000	6,750,000
d. Krp cantang	7	100	90,000	9,000,000
	7	200	90,000	18,000,000
	7	150	90,000	13,500,000
	7	250	90,000	22,500,000
	7	100	90,000	9,000,000
	7	100	90,000	9,000,000
	7	150	90,000	13,500,000
	7	90	90,000	8,100,000
	7	80	90,000	5,600,000
e. rl longline	1.5	2500	2,500	6,250,000
	1.5	2500	2,500	2,500,000
	1.5	2500	2,500	6,250,000
	1.5	2500	3,500	6,250,000
	1.5	2500	2,500	6,250,000
	1.5	2500	2,500	6,250,000
f. kerapu cantik	18	50	350,000	17,500,000
	18	50	350,000	17,500,000
g. lele	4	750	20,000	15,000,000
	4	700	15,000	10,500,000
h. bandeng	4	800	20,000	16,000,000
	4	500	20,000	10,000,000
i. udang vaname	4	500	50,000	25,000,000
	4	500	50,000	25,000,000
j. kerapu macan	7	100	80,000	8,000,000
k. nila	6	700	20,000	14,000,000



## Lampiran 4. Mata Pencapaian Utama dan Penghasilan Utama Nelayan

No.	Nama	Budidaya	Mata Pencapaian Utama		Penghasilan Utama	
			Sebelum Kompensasi	Setelah Kompensasi	Sebelum	Setelah
1	Saparudin	Kerapu cantang	Penangkap	Budidaya	2,000,000	4,000,000
2	Samsul Ihsan	Kerapu cantang	Nelayan	Nelayan/budidaya	1,000,000	1,800,000
3	Junaidi	Kerapu cantang	Pembudidaya	budidaya	1,200,000	1,500,000
4	Misbah	Kerapu cantang	Penangkap/Pembudidaya	Penangkap/Pembudidaya	1,000,000	1,300,000
5	Darmun	Kerapu cantang	Nelayan/Pembudidaya	Nelayan/Pembudidaya	1,000,000	1,250,000
6	Yusuf	Kerapu cantang	Nelayan/Pembudidaya	Nelayan/Pembudidaya	900,000	1,400,000
7	Sahri	Kerapu cantang	Nelayan/Pembudidaya	Nelayan/Pembudidaya	1,100,000	1,350,000
8	sahdi	Kerapu cantang	Nelayan/Pembudidaya	Nelayan/Pembudidaya	1,250,000	1,500,000
9	minun	Kerapu cantang	budidaya	Budidaya	1,200,000	1,400,000
10	rundeh	longline	budidaya	budidaya	3,500,000	4,000,000
11	rusman	longline	budidaya dan tangkap	budidaya dan tangkap	1,500,000	1,500,000
12	munaah	rumput laut	budidaya R laut	budidaya R laut	500,000	1,500,000
13	nuruddin	rumput laut	budidaya	budidaya	4,000,000	6,000,000
14	mahrep	rumput laut	budidaya	budidaya	500,000	500,000
15	L. Apipuddin	rumput laut	budidaya	budidaya	3,000,000	4,000,000
16	mahsar	rumput laut	budidaya RL	budidaya RL	2,500,000	2,500,000
17	Mahidin	rumput laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	3,000,000
18	Hardianto	rumput laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	4,000,000
19	AQ. Mine	rumput laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	4,500,000
20	Minhar	rumput laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	3,000,000
21	Sahrim	rumput laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	4,500,000
22	Saimah	rumput laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	3,000,000



23	Subki	rumpul laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	4,500,000
24	Sunardi	rumpul laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	3,000,000
25	Samsul Rizal	rumpul laut	budidaya R laut	budidaya R laut	2,000,000	3,000,000
26	Abd. Haris	rumpul laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	3,000,000
27	Abdul Karim	rumpul laut	budidaya R laut	budidaya R laut	3,000,000	4,000,000
28	Rumawe	rumpul laut	budidaya R laut	budidaya R laut	2,000,000	4,000,000
29	Denan	bawal bintang	nelayan{bagan tancap}	nelayan{bagan tancap}	1,360,000	1,360,000
30	Mahli	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,400,000	1,400,000
31	Sapardi	bawal bintang	nelayan{bagan tancap}	nelayan{bagan tancap}	1,380,000	1,380,000
32	Syukur Ismail	bawal bintang	nelayan{bagan tancap}	nelayan{bagan tancap}	1,420,000	1,420,000
33	Abdurrahman	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,360,000	1,360,000
34	Asmin	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,430,000	1,430,000
35	Muhayang	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,450,000	1,450,000
36	Muhajidin	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,445,000	1,445,000
37	Mustarep	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,435,000	1,435,000
38	Sukardi	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,410,000	1,410,000
39	Samsul Hikmah	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,470,000	1,470,000
40	Abdul Akhir	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,425,000	1,425,000
41	Seri Sando	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,470,000	1,470,000
42	Murni	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,440,000	1,440,000
43	Sapardi	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,450,000	1,450,000
44	Musmuliadi	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,390,000	1,390,000
45	Abdul Rahim	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,475,000	1,475,000
46	Amaq Dedi Irawan	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,475,000	1,475,000
47	Sahdi	bawal bintang	nelayan	nelayan	1,415,000	1,415,000



48	Darwis Sumbang	budidaya lele	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
49	Abd Rahim	bandeng	budidaya	budidaya	2,000,000	2,000,000	500,000
50	Sahirudin	kerapu macan	nelayan	nelayan	3,000,000	3,000,000	3,000,000
51	Mursap	kerapu cantik	budidaya	budidaya	25,000,000	25,000,000	15,000,000
52	Muhsan	kerapu cantik	nelayan	nelayan	3,000,000	3,000,000	3,000,000
53	Nurdin	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,600,000	1,600,000	1,600,000
54	Saripin	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
55	Rustam	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
56	Suandi	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,000,000	1,000,000	1,000,000
57	Bpk Nurul Hikmah	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
58	Saeful Rahman	kerapu tikus	nelayan	nelayan	2,000,000	2,000,000	2,000,000
59	Muhammad	kerapu tikus	budidaya lobster	budidaya lobster	1,000,000	1,000,000	1,000,000
60	AQ Mansur	kerapu tikus	budidaya lobster	budidaya	7,000,000	7,000,000	5,000,000
61	L Nurbayan Jaya Kusuma	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
62	Zainal Abidin	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
63	Muhammad Zaini	kerapu tikus	Tetap	tetap	1,500,000	1,500,000	1,500,000
64	H. Khaerudin	kerapu tikus	budidaya	budidaya	22,000,000	22,000,000	10,000,000
65	Nurman	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,600,000	1,600,000	1,600,000
66	Mahrip	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
67	Mansur	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
68	Winengam	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,000,000	1,000,000	1,000,000
69	Deris	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000
70	Imran	kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,500,000	1,500,000

		kerapu tikus	nelayan	nelayan	1,500,000	1,000,000
71	Mastur	kerapu tikus	nelayan			
72	Umar	kerapu tikus	Tetap		1,500,000	1,500,000
73	H. Moh Mansur	bandeng	budidaya		1,000,000	2,750,000
74	Sahudi/Aq. Udin	bawal bintang	budidaya lobster	bawalbintang/lobster	750,000	1,500,000
75	Suhardi	ikan nila	budidaya ikan nila	budidaya ikan nila	2,500,000	3,000,000
76	Junaidi	budidaya lele	penangkapan	penangkapan	3,000,000	4,500,000
77	Hasan Basri	bud.udang vanamei	budidaya tambak	budidaya tambak	3,000,000	3,000,000
78	Jumadil	bud.udang vanamei	penangkapan	penangkapan	4,000,000	4,700,000
79	Sahran	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,000,000	400,000
80	AQ.Haerudin	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,850,000	2,300,000
81	Kamarudin	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	1,000,000	1,000,000
82	H. Daeng Ibrahim	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,500,000	3,000,000
83	Wildan	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,500,000	3,000,000
84	AQ.Anto	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	1,000,000	2,500,000
85	Muh Tohri	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,500,000	2,500,000
86	Sahdan	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	1,500,000	1,000,000
87	Hanzun	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,000,000	2,500,000
88	AQ. Darmawan	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	1,500,000	1,500,000
89	Gupran Hamdi	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	3,000,000	3,000,000
90	Saripudin	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,500,000	2,500,000
91	Hasbullah	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	3,500,000	3,500,000
92	Sahidun	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,500,000	2,500,000



93	Sukaji	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	3,000,000	3,000,000
94	Sapwan	budidaya kerapu	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,000,000	2,000,000
95	Jumadil	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,000,000	2,000,000
96	Zainul Husni	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu, bebek	1,000,000	500,000
97	Sadli	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya k	2,500,000	1,000,000
98	Syamsudin	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	3,000,000	3,000,000
99	Sahabudi	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	3,000,000	3,000,000
100	Sahdeng	kerapu tikus	budidaya kerapu	budidaya kerapu	3,000,000	3,000,000

Lampiran 5. Mata Pencapaian Sampangan dan Penghasilan Sampangan Nelayan

No.	Mata Pencapaian Sampangan		Penghasilan Sampangan		Total Penghasilan	
	Sebelum Kompensasi	Setelah Kompensasi	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	Boat wisata	Boat wisata	2,500,000	2,500,000	4,500,000	6,500,000
2	Pekebun	Pekebun	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,800,000
3	Pekebun	Pekebun	1,000,000	1,000,000	2,200,000	2,500,000
4	Boat wisata	Boat wisata	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,300,000
5	Kios	Kios	1,000,000	250,000	2,000,000	1,500,000
6	peladang	peladang	2,000,000	2,000,000	2,900,000	3,400,000
7	Boat wisata	Boat wisata	2,000,000	2,000,000	3,100,000	3,350,000
8	Boat wisata	Boat wisata	2,000,000	2,000,000	3,250,000	3,500,000
9	peladang	peladang	2,500,000	2,700,000	3,700,000	4,100,000
10	Nelayan	Nelayan	3,000,000	2,000,000	6,500,000	6,000,000
11	tangkap	tangkap	2,000,000	1,500,000	3,500,000	3,000,000
12	tangkap	tangkap	500,000	500,000	1,000,000	2,000,000
13	-	tangkap,dagang	-	1,000,000	4,000,000	7,000,000
14	tangkap	tangkap	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000
15	tangkap	tangkap	1,500,000	1,500,000	4,500,000	5,500,000
16	nangkap ikan	budidaya kerapu	3,000,000	4,000,000	5,500,000	6,500,000
17	nangkap bibit lobster	nangkap ikan	4,000,000	4,500,000	7,000,000	7,500,000
18	nangkap bibit lobster	nangkap ikan	2,500,000	5,000,000	5,500,000	9,000,000
19	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	3,500,000	6,000,000	8,000,000
20	nangkap bibit lobster	nangkap ikan	4,500,000	4,000,000	7,500,000	7,000,000
21	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	3,000,000	6,000,000	7,500,000
22	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	3,500,000	6,000,000	6,500,000



23	budidaya kerapu	budidaya kerapu	2,500,000	3,000,000	3,000,000	5,500,000	7,500,000
24	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	4,000,000	4,000,000	6,000,000	7,000,000
25	nangkap bibit lobster	nangkap ikan	3,500,000	4,000,000	4,000,000	5,500,000	7,000,000
26	nangkap bibit lobster	nangkap ikan	4,000,000	3,500,000	3,500,000	7,000,000	6,500,000
27	nangkap ikan	budidaya kerapu	2,500,000	4,000,000	4,000,000	5,500,000	8,000,000
28	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	4,500,000	4,500,000	5,000,000	8,500,000
29	budidaya lobster	-	5,333,000	-	-	6,693,000	1,360,000
30	budidaya lobster	-	3,083,000	-	-	4,483,000	1,400,000
31	budidaya&pengepul	budidaya&pengepul	55,333,000	-	-	56,713,000	1,380,000
32	budidaya	-	5,250,000	-	-	6,670,000	1,420,000
33	budidaya	-	5,333,000	-	-	6,693,000	1,360,000
34	budidaya	-	4,125,000	-	-	5,555,000	1,430,000
35	budidaya	-	4,310,000	-	-	5,760,000	1,450,000
36	budidaya	-	4,350,000	-	-	5,795,000	1,445,000
37	budidaya	-	4,375,000	-	-	5,810,000	1,435,000
38	budidaya	-	4,310,000	-	-	5,720,000	1,410,000
39	budidaya	-	4,330,000	-	-	5,800,000	1,470,000
40	budidaya	-	4,250,000	-	-	5,675,000	1,425,000
41	budidaya	-	4,410,000	-	-	5,880,000	1,470,000
42	budidaya	-	4,450,000	-	-	5,890,000	1,440,000
43	budidaya	-	4,510,000	-	-	5,960,000	1,450,000
44	budidaya	-	4,100,000	-	-	5,490,000	1,390,000
45	budidaya	-	4,320,000	-	-	5,795,000	1,475,000
46	budidaya	-	5,110,000	-	-	6,585,000	1,475,000
47	budidaya	-	4,320,000	-	-	5,735,000	1,415,000
48	kebun	kebun	500,000	500,000	500,000	2,000,000	2,000,000





75	nangkap bibit lobster	Penangkapan	4,000,000	3,500,000	6,500,000	6,500,000
76	penangkapan(jaring)	penangkapan(jaring)	3,000,000	4,500,000	6,000,000	9,000,000
77	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000
78	nangkap bibit lobster	nangkap bibit lobster	3,000,000	3,000,000	7,000,000	7,700,000
79	nelayan	Nelayan	2,500,000	2,500,000	4,500,000	2,900,000
80	nelayan	Nelayan	2,500,000	2,000,000	5,350,000	4,300,000
81	nangkap bibit lobster	Nelayan	4,000,000	2,800,000	5,000,000	3,800,000
82	nangkap bibit lobster	Nelayan	3,500,000	3,500,000	6,000,000	6,500,000
83	nangkap bibit lobster	nangkap bibit lobster	3,500,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000
84	nangkap bibit lobster	Nelayan	2,500,000	2,500,000	3,500,000	5,000,000
85	nangkap ikan	nangkap ikan	2,500,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000
86	nelayan	Nelayan	2,600,000	2,600,000	4,100,000	3,600,000
87	nangkap bibit lobster	Nelayan	3,000,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000
88	nelayan	Nelayan	2,500,000	2,500,000	4,000,000	4,000,000
89	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000
90	nangkap ikan	nangkap ikan	2,500,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000
91	nangkap ikan	nangkap ikan	3,500,000	3,500,000	7,000,000	7,000,000
92	nangkap ikan	nangkap ikan	2,500,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000
93	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000
94	nangkap ikan	nangkap ikan	2,500,000	2,500,000	4,500,000	4,500,000
95	nangkap bibit lobster	Nelayan	2,500,000	2,500,000	4,500,000	4,500,000
96	nelayan	Nelayan	2,500,000	2,500,000	3,500,000	3,000,000
97	nangkap ikan	nangkap ikan	2,500,000	2,500,000	5,000,000	3,500,000
98	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000
99	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000
100	nangkap ikan	nangkap ikan	3,000,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000

Lampiran 6. Hasil Uji t test  
**T-Test**

[DataSet2] E:\ESDUAUE\PENELITIAN UI1\RONI YESIS\RONI YUHAERI SPSS\Frekuensi tangkap.sav

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	13.86	100	10.511	1.051
	1.17	100	5.292	.529

Paired Samples Correlations

Pair	N	Correlation	Sig.
1	100	.275	.006

Paired Samples Test

Pair	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
1	12.690	10.387	1.039	10.629	14.751	12.217	99	.000



**T-Test**

[DataSet0] E:\ESDUATE\PENELITIAN UI\RONI IESIS\RONI YUHARI SPSS\Frekuensi tangkap.sav

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Penghasilan.sebelum	6218520	100	7716905.165	771690.5
Penghasilan.sesudah	4486000	100	3835825.606	383582.6

**Paired Samples Correlations**

Pair	N	Correlation	Sig.
1 Penghasilan.sebelum & Penghasilan.sesudah	100	.544	.000

**Paired Samples Test**

Pair	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
1 Penghasilan.sebelum - Penghasilan.sesudah	1732520	6485710.751	648571.1	445614.3	3019426	2.671	99	.009

**T-Test**

[DataSet0] E:\ESDUAUTE\PENELITIAN UT1\RONI TESTIS\RONI YUHAERI SPSS\Frekuensi tangkap.sav

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Penghasilan.sebelum	6218520	100	7716905.165	771690.5
1 Penghasilan.sesudah	4486000	100	3835325.606	383582.6

**Paired Samples Correlations**

Pair	N	Correlation	Sig.
1 Penghasilan.sebelum & 1 Penghasilan.sesudah	100	.544	.000

**Paired Samples Test**

Pair	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
1 Penghasilan.sebelum - 1 Penghasilan.sesudah	1732520	6485710.751	648571.1	445614.3	3019426	2.671	99	.009





PERATURAN  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 56/PERMEN-KP/2016  
 TENTANG  
 LARANGAN PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN LOBSTER (*Panulirus*  
*spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DARI WILAYAH  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf q dan huruf t Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), perlu mengatur kembali penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN LOBSTER (*Parulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Pasal 3

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.24.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- b. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak

- bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- c. pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal; atau
  - d. pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

#### Pasal 4

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran Rajungan (*Portunus* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.29.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor.
- (2) Pengeluaran Rajungan (*Portunus* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.29.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

#### Pasal 5

Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

#### Pasal 6

Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



## Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
- (2) Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib:
  - a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;
  - b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Pengawasan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.
- (3) Pengawasan komoditas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1999

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,





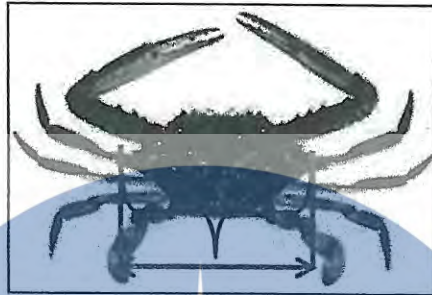
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
LARANGAN PENANGKAPAN DAN/ATAU  
PENGELUARAN LOBSTER (*Panulirus spp.*),  
KEPITING (*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)



Gambar Pengukuran lobster

Gambar Pengukuran Kepiting



Gambar Pengukuran Rajungan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Tini Martini